

BAB IV

GAMBARAN UMUM PROFIL ORGANISASI

A. PENDAHULUAN

Demi memperjuangkan kepentingannya, masyarakat sipil yang mandiri dari negara mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok kepentingan yang beragam. Dengan kemandiriannya, OKP ini bebas menjalin relasi dan membangun jaringan dengan apapun yang menjamin tercapainya kepentingan mereka. Dengan keragaman kepentingannya, OKP juga bersifat sangat plural dalam karakter, strategis, dan perspektif. Globalisasi telah menghadirkan suatu tatanan geopolitik yang bersifat transnasional. Negara-bangsa menjadi lemah karena imajinasi warga masyarakat terlalu luas untuk dibatasi kepada sepetak ruang identitas bernama bangsa. Kita dapat melihat OKP bekerja dalam lanskap jejaring, sifatnya bisa lokal, regional, hingga transnasional. Mereka sejatinya tidak digerakkan oleh negara-bangsa, bahkan justru berpotensi mengontrol dinamika yang terjadi dalam sebuah atau sejumlah negara-bangsa.

B. PROFIL KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

Masa reformasi 1998 membawa perubahan dalam dinamika politik di Indonesia. Gerakan mahasiswa yang terkungkung dengan kebijakan NKK / BKK di masa orde baru menemukan celah untuk berekspresi. Terkhusus aktivis mahasiswa muslim yang selama NKK / BKK melakukan aktivitasnya dengan menjadi aktivis mesjid kampus dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) melihat bahwa permasalahan bangsa dan Negara yang terjadi selama orde baru adalah permasalahan mereka juga. Dengan memanfaatkan ajang konggres Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) IX di Malang pada tanggal 26-28 Maret 1998, mereka bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga baru sebagai jawaban dari permasalahan bangsa saat itu. Dan lembaga tersebut dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang dideklarasikan di Malang pada tanggal 29 Maret 1998.

Dalam perjalanan waktunya, 11 tahun KAMMI lahir di Indonesia mengalami banyak dinamika. Dan yang patut dikaji dalam penelitian ini adalah

bagaimana KAMMI berdialektika dengan Indonesia sebagai sebuah Negara-bangsa. Mengingat KAMMI yang awalnya merupakan organisasi ekstra kampus berlandaskan Islam sebagai asas organisasinya, menurut pengamatan peneliti kini tidak hanya sekedar organisasi ekstra kampus, tetapi berubah menjadi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Apakah hal ini juga sebagai bentuk strategi perjuangannya? Lalu bagaimana KAMMI menerapkan nilai-nilai Islam sebagai bentuk pengejawantahan dari visi dan misi KAMMI? Dan bagaimana KAMMI mendialogkan Islam dengan Nasionalisme?

KAMMI lahir di tengah gegap gempita perjuangan reformasi 98. pada saat itu krisis multi dimensi melanda asia sejak 1997, termasuk Indonesia yang pada saat itu baru saja mendapatkan predikat sebagai negara yang stabil fiskal dan moneter. Presiden Soeharto kala itu baru saja menangani perpanjangan kontrak dengan IMF. Gejolak yang dimulai dengan krisis moneter melanda setiap sektor, kenaikan harga bahan pokok hingga tiga kali lipatnya dan nilai tukar rupiah yang jatuh bebas terhadap dollar AS. Situasi ini menimbulkan shock yang dalam. Indonesia terjebak dalam lembah krisis dan jebakan utang luar negeri yang sangat besar. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan amuk massa, kerusuhan dan penjarahan terjadi dimana-mana.

Pada saat itu KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif Mahasiswa yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) X seindonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini dihadiri oleh 59 LDK yang berafiliasi dari 63 kampus (PTN-PTS) diseluruh Indonesia . Jumlah peserta keseluruhan kurang lebih 200 orang yang notabene para aktifis dakwah kampus. KAMMI lahir pada ahad tanggal 29 April 1998 PK.13.00 wib atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1418 H yang dituangkan dalam naskah Deklarasi Malang. Dan dipilihlah Ketua Umum yang pertama Fahri Hamzah dan Sekretaris Jendralnya Haryo Setyoko.

Ada tujuh alasan mendasar mengapa dibentuknya KAMMI di tahun 1998, yaitu:¹

¹ Amrullah, Taufiq. *KAMMI Menuju Muslim Negarawan, Meretas Kebangkitan Indonesia*. Bandung. Muda Cendikia, 2008. hal 54

1. Adanya indikator yang mematikan potensi bangsa, yaitu rezim otoriter yang demokrasi, budaya koruptif di semua lini birokrasi, dan hukum yang tidak ditegakkan.
2. Urgensi dari enam visi Reformasi sebagai tuntutan kritis KAMMI bersama berbagai elemen mahasiswa.
3. Adanya Kepentingan Umat Islam Untuk Segera Berbuat lebih untuk perbaikan umat.
4. Aksi Demontrasi dan Mimbar Bebas Semakin Menjamur sebagai efek dari pengeangan demokrasi selama orde baru.
5. Mahasiswa Islam Merupakan Elemen Sosial sebagaimana elemen masyarakat lainnya.
6. Suara Umat Islam di masa orde baru selalu diabaikan dan dianggap "nomor dua" jika dibandingkan dengan suara dari pihak militer.
7. Depolitisasi Kampus dengan program NKK / BKK Memandulkan Peran kritis mahasiswa dalam perbaikan bangsa dan negara.

Pemilihan nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang kemudian disingkat KAMMI mengandung makna atau memiliki konsekwensi pada beberapa hal yaitu :

1. KAMMI adalah sebuah kekuatan terorganisir yang menghimpun berbagai elemen Mahasiswa Muslim baik perorangan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama KAMMI.
2. KAMMI adalah sebuah gerakan yang berorientasi kepada aksi real dan sistematis yang dilandasi gagasan konsepsional yang matang mengenai reformasi dan pembentukan masyarakat Islami (berperadaban).
3. Kekuatan inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa pada berbagai stratanya yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar.
4. Visi gerakan KAMMI dilandasi pemahaman akan realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.

Asas KAMMI

KAMMI berasaskan Islam

Visi KAMMI

Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia.

Misi KAMMI

1. Membina keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
2. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa.
3. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera.
4. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kerakyatan dan kebangsaan.
5. Mengembangkan kerjasama antar elemen masyarakat dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma`ruf nahi munkar).

Prinsip Gerakan KAMMI

1. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
4. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI
5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

Dan saat ini KAMMI terdiri dari 19 KAMMI Wilayah dan 43 KAMMI Daerah yang tersebar di 33 Propinsi. Dengan Ketua Umum PP KAMMI saat ini adalah Rijalul Imam, M.Si.

Sebagai sebuah organisasi yang terlahir dari antitesa pengekangan orde baru terhadap kebebasan sosial politik dunia kampus. KAMMI seperti menjadi sebuah pelarian bagi aktivis dakwah kampus yang selama orde baru hanya beraktivitas di

dalam mesjid kampus. Mungkin dalam hal ini, KAMMI bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan *civil society* yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh Negara. Kemunculannya yang memang tidak terduga sebelumnya, merupakan sebuah inisiatif yang lahir dari kalangan mahasiswa muslim kampus.

Berdasarkan kajian AS Hikam, gerakan *civil society* yang menjadi arus utama di Indonesia dapat dipilah berdasarkan lima pilar. *Pertama* adalah mereka yang bergerak dalam kerangka apa yang disebutnya sebagai politik arus bawah. Politik arus bawah (*grassroots politics*) digunakan untuk menunjukkan praktik dan diskursus politik masyarakat kelas bawah mulai dari para petani dan buruh di wilayah pedesaan sampai buruh industri, pedagang kecil, dan mereka yang bekerja ditempat yang disebut sektor informal di perkotaan. Menurut Hikam, penetrasi kapitalisme menyumbangkan ciri baru terhadap gerakan politik arus bawah yang bersifat lokal dan berorientasi non-kelas, dan berubah menjadi gerakan nasional dan memiliki kesadaran kelas dalam dirinya.²

Di samping itu, mereka menjadi lebih terorganisir dan berhubungan dengan gerakan dan ideologi politik modern lainnya yang memiliki tujuan akhir untuk meruntuhkan rezim kolonial dan menciptakan suatu sistem politik baru di Negara yang merdeka. Organisasi masyarakat sipil yang berkonsentrasi dalam politik arus bawah di Indonesia menggunakan strategi nonrevolusioner dan bertahap. Mereka telah berusaha mendorong praktik dan diskursus politik melalui strategi berorientasi kemasyarakatan dan nonradikal seperti membela hak-hak buruh, advokasi masyarakat lokal terkait kerusakan ekologis, menjalankan penilaian kritis atas aksi-aksi politik, dan membuat pernyataan politik yang berkaitan dengan hak asasi, keadilan ekonomi, demokrasi, dan solidaritas sosial.³

Kedua, gerakan *civil society* berorientasi keislaman. Menurut Hikam, gerakan-gerakan keislaman di Indonesia memiliki umur paling panjang sejak masa kolonial. Dalam sejarah Indonesia modern, gerakan masyarakat sipil berbasis keislaman terutama dimulai sejak Sarekat Islam pada tahun 1912. Dalam perkembangannya, baik pada orde lama maupun orde baru, gerakan ini

² Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1999. Cetakan Kedua. Hal 114-115

³ *Ibid.* Hal 128

tetap hidup.⁴ Namun, kelompok-kelompok keislaman yang besar di Indonesia memiliki banyak ragam dan varian. Martin van Bruinessen (2004) membaginya ke dalam dua kelompok, moderat dan fundamentalis. Kelompok pertama berkembang dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat dan sejak awal 1990-an mengembangkan suatu dialog dan kerjasama dengan kalangan non-Muslim sembari mengambil jarak yang sangat tegas dengan kalangan yang berasal dari organisasi-organisasi Islamis.⁵ Sementara kelompok yang terakhir berkembang dalam karakter yang disebut *jamaah* dan *usrah*. Menurut van Bruinessen, kelompok ini menyebar lewat jaringan berbasis kampus dan jaringan berbasis masjid.⁶

Van Bruinessen menyebut empat karakter utama dari kelompok *jamaah* dan *usrah* ini: (a) mereka sangat kritis terhadap negara sekuler dan hanya percaya kepada sebuah negara berdasarkan syariah; (b) mereka membentuk kelompok-kelompok yang relatif dekat dan menjauhi kontak dengan kalangan luar; (c) mereka menegaskan bahwa Islam adalah sebuah jalan hidup yang paripurna dan menuntut anggotanya untuk berpegang kepada norma-norma keislaman dalam segala aspek kehidupan; dan (d) mereka menerapkan suatu kontrol sosial yang ketat terhadap anggotanya dan menuntut standar moralitas keislaman yang tinggi. Selain itu, ciri dari struktur mereka adalah organisasi yang hirarkis, adanya struktur sel di mana *usrah* adalah unit terkecil, dan watak organisasi yang tertutup. Informasi yang mengalir di dalam organisasi bersifat vertikal, tidak horizontal. Tiga organisasi yang paling menonjol dari kelompok ini, menurut Bruinessen, adalah *Jamaah Islamiyah*, *Tarbiyah*, dan *Hizbut Tahrir*. Mereka, terutama yang disebut terakhir, adalah organisasi-organisasi yang cenderung bersifat transnasional.⁷

Selain gerakan *civil society* berwatak keislaman, kategori ketiga, menurut Hikam, adalah organisasi *civil society* berupa LSM yang “terkungkung” pada wacana pembangunanisme. Mereka tidak kritis terhadap masalah-masalah

⁴ *Ibid.* Hal 144

⁵ Bruinessen, Martin Van. *Post-Soeharto Muslim Engagements with Civil Society and Democratization*” dalam Hanneman Samuel dan Henk Schulte Nordholt. *Indonesia in Transition: Rethinking ‘Civil Society’, ‘Region’, and ‘Crisis’*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hal 47-48

⁶ *Ibid.* Hal 49

⁷ *Ibid.* Hal 52

ketimpangan struktural, kelangkaan partisipasi, dan ketergantungan terhadap kekuatan luar. Ia mengidentikkan LSM ini dengan organisasi yang “sering menampakkan diri sebagai agen-agen subkontraktor pembangunan dari lembaga-lembaga milik pemerintah maupun swasta asing.” Ia mempertentangkan LSM ini dengan gerakan civil society yang berorientasi pada *new social movements*.⁸

Keempat, organisasi *civil society* yang berorientasi primordial kesukuan. Hikam tidak menyebutkan secara eksplisit kategori ini. Namun, dalam pembahasan mengenai kelas menengah sebagai penggerak *civil society* di Indonesia, ia membedakan antara situasi Indonesia dan Barat. Menurutnya, di negara-negara kapitalis Barat, kelas menengah yang tumbuh sebagai akibat modernisasi mampu tampil sebagai kekuatan yang mandiri dan pengimbang negara. Sementara itu, kelas menengah di Indonesia masih belum mampu mengatasi problem cultural yang berbentuk keterkaitan primordial. Terjadi pemilahan kelas menengah pribumi-non pribumi, Jawa-non Jawa, atau Muslim-non Muslim.⁹

Jika mengacu pada teori yang disusun oleh Hikam dan Bruinessen, maka KAMMI masuk ke dalam kategori gerakan *civil society* yang berorientasi pada keislaman dan jika dilihat dari strategi perjuangannya maka KAMMI masuk ke kategori pertama, yaitu apa yang disebut sebagai politik arus bawah. Dalam melakukan gerakannya, KAMMI menjadi lebih terorganisir dan berhubungan dengan gerakan dan ideology politik modern lainnya yang memiliki tujuan akhir untuk meruntuhkan rezim kolonial dan menciptakan suatu system politik baru di Indonesia.

Apabila dilihat dari kajian Bruinessen, maka KAMMI sebagai sebuah OKP berbasis mahasiswa muslim. Dengan pola pengkaderan berbasis usrah dan halaqoh. Kelompok ini menyebar lewat jaringan kampus dan masjid. Yudi Latif menyampaikan, gerakan masjid kampus dan kelompok-kelompok diskusi umum sendiri menunjukkan kecenderungan antitesis. Ideologi perlawanan dari gerakan masjid banyak ditimba dari ideologi-ideologi Islamis. Dalam perkembangan lebih jauh, gerakan masjid menjadi lebih berhasil mengkonsolidasikan dirinya dan mengembangkan jaringan dakwahnya ke luar kampus dan antar kampus.

⁸ Hikam. *Op.Cit.* Hal 258

⁹ *Ibid.* Hal 5

Perkenalan kelompok-kelompok aktivis masjid kampus dengan aspek-aspek tertentu dari ideology gerakan Islam yang bersifat internasional, seperti Ikhwanul Muslimin (IM), tampaknya tidak hanya mempengaruhi pemikiran mereka, tetapi juga ikut mempengaruhi metode atau kurikulum training-training atau halaqoh-halaqoh yang mereka lakukan, termasuk di Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Diterjemahkannya buku-buku karya Sayyid Quthb, Yusuf Qardhawi, atau Hasan Al Banna, misalnya ikut memperluas jangkauan pemikiran mereka, dan meningkatkan arti penting pikiran-pikiran mereka bagi sejumlah aktivis mesjid kampus di kota-kota besar di tanah air.

C. PROFIL GEMA PEMBEBASAN DAN HIZBUT TAHRIR

Gerakan Mahasiswa Pembebasan atau biasa disebut sebagai Gema Pembebasan (GP) merupakan OKP khususnya organisasi mahasiswa ekstra kampus yang dibentuk pada tanggal 28 Februari 2004 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.

Setelah terbentuk, organisasi ini membentuk struktur baku Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Komisariat (PK). Tahun 2008 ini ketua umum PP Gema Pembebasan adalah Muthohar Jamil setelah sebelumnya menggantikan M Amir Muttaqin.

Sebagai organisasi mahasiswa Islam ideologis, Gema Pembebasan memiliki kegiatan antara lain:

- Penulisan dan penyebaran artikel serta buletin keislaman
- Mengadakan bedah buku
- Mengadakan kajian keislaman tematik dan kajian bahasa arab.
- Mengadakan outbound dan pelatihan
- Mengadakan dialog pemikiran
- Mengadakan seminar-seminar keislaman
- Menanggapi masalah-masalah yang aktual dengan sudut pandang Islam.
- Mengadakan acara bersama dengan Lembaga Dakwah Kampus lainnya.
- Mengadakan aksi simpatik pada moment-moment tertentu.

VISI

Menjadikan Ideologi Islam sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia.

MISI

- a. Mengembangkan manajemen pengelolaan opini ideologi Islam sehingga memiliki daya gugah yang membangun kesadaran politik dan daya pembebas terhadap seluruh faktor yang membelenggu Islam.
- b. Membangun jaringan pergerakan Mahasiswa Islam ideologis di seluruh Indonesia.
- c. Mengembangkan sistem pendukung bagi transformasi ideologi Islam di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa.
- d. Membentuk kader pergerakan mahasiswa Islam yang ideologis dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan opini.

TUJUAN

Terbentuknya opini Islam Ideologis di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa di Indonesia.

Sebagai usaha perekrutan dan pengkaderan di tataran mahasiswa, maka dilakukanlah inisiasi pembentukan sayap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang bernama Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Oleh karena itu, dalam kegiatannya GP banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sinergis dengan agenda-agenda HTI, antara lain: aksi solidaritas dunia Islam dan penegakan khilafah, aksi dukung RUU Pornografi, seminar bersama, dan lain-lain.

Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (berarti Partai Pembebasan) adalah sebuah organisasi politik yang berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Pendirinya adalah Taqiyuddin An-Nabhani, seorang alumnus Al-Azhar Mesir, ulama terkenal, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir berdiri pada mulanya sebagai respons terhadap perjuangan pembebasan bangsa Palestina dari pendudukan Israel. Namun, lebih dari sekadar isu Palestina, organisasi ini berjuang menegakkan kembali institusi khilafah Islamiyah yang dilikuidasi oleh parlemen Turki pada tahun 1924. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Hizbut Tahrir mengembangkan diri sebagai gerakan yang bersifat transnasional. Ia telah berkembang ke segenap penjuru negeri Arab di Timur

Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Perkembangannya yang pesat juga merambah benua Eropa, Amerika, Australia, dan Asia. Organisasi ini telah berdiri di negara-negara seperti Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia¹⁰.

Tidak ada data pasti tentang tanggal masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia. Namun, situs Hizbut Tahrir Indonesia sendiri menyebut bahwa organisasi politik ini masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Figur yang banyak dikaitkan dengan kehadiran HT di Indonesia adalah Abdurrahman Al-Baghdadi. Sosok ini adalah warga Australia namun berasal dari Yordania. Di negeri asalnya ia adalah muballigh yang cukup terkemuka. Al-Baghdadi masuk ke Indonesia pertama kali atas undangan dari pemimpin pesantren Al-Ghazali, Bogor, K.H. Abdullah bin Nuh¹¹. Selanjutnya bersama M. Mustafa, Abbas Aula, dan Abdul Hannan sejumlah aktivitas keislaman digelar di pesantren Al-Ghazali dan Kampus IPB. Mereka dengan cepat merekrut aktivis Muslim di IPB yang dimotori oleh Fathul Hidayat, Adian Husaini, Asep Saifullah, Hasan Rifai, dan sebagainya. Orang-orang ini lah yang memiliki peran besar dalam pengembangan gerakan partai ini di Bogor maupun perluasannya di berbagai kampus lain di luar Bogor¹².

Mengingat pemerintah tidak mengizinkan adanya suatu organisasi berbasas non- Pancasila, maka belum ada deklarasi khusus tentang keberadaan Hizbut Tahrir sebagai suatu organisasi. Alasan lainnya adalah karakter awalnya sebagai organisasi klandestin. Di sejumlah negara di Timur Tengah seperti Yordania, Syiria, dan Mesir, keberadaan HT dilarang oleh pemerintah. Para tokohnya kerap menjadi target penangkapan. Di Indonesia, meski secara sembunyi-sembunyi, aktivitas dakwah HT berkembang cukup pesat. Pintu masuk bagi dakwah mereka adalah kampus-kampus umum. Mereka pula yang merintis aktivitas dakwah kampus yang mulai semarak sejak dekade 1980-an. Mereka juga mendekati

¹⁰ Hizbut Tahrir Indonesia. *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*. Jakarta: HTI. 2004. hal 1

¹¹ Mubarak, M Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES 1990. hal 128-129

¹² Imdadun, Muhammad. *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi Atas Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia.* Tesis S2 Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2003. Hal 136

komunitas Muslim profesional di perkantoran, perusahaan, hingga kompleks perumahan. Di masa orde baru, HT memang menjadi gerakan bawah tanah. Mereka membentuk organisasi sel yang mengandalkan jaringan. Dari Institut Pertanian Bogor (IPB), jaringannya semakin meluas ke kampus-kampus seperti Universitas Padjajaran, Bandung; IKIP Malang; Universitas Airlangga, Surabaya, dan Universitas Hasanuddin, Makassar. Perkembangannya di kampus-kampus didukung oleh jaringan lembaga dakwah kampus yang telah ada sebelumnya¹³.

Aktivitas HT mulai menyeruak pasca-Reformasi. Mereka dikenal dengan aksi demonstrasi damai berbalut pakaian serba putih dan menyerukan slogan tentang pembentukan khilafah islamiyah. Pada bulan Maret 2002 untuk pertama kalinya secara terbuka HT mengkampanyekan tentang kewajiban Khilafah Islamiyah dalam Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Istora Senayan, Jakarta. Konferensi tersebut menjadi ajang deklarasi resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Setelah konferensi tersebut, HT melakukan kunjungan ke Wapres Hamzah Haz sambil membawa pesan perlunya segera diterapkan syariat Islam sebagai solusi atas persoalan bangsa yang bersifat multidimensional. Pada bulan Agustus 2002, saat MPR menggelar Sidang Tahunan yang membahas pengesahan Rancangan Amendemen UUD 1945, HTI melakukan aksi massa yang melibatkan 20.000 orang di depan Gedung DPR/MPR Senayan. Mereka juga membawa draf rancangan Konstitusi Indonesia versi mereka.¹⁴

Pada tanggal 5 Oktober 2003, organisasi ini melakukan langkah yang lebih berani. Ia menggelar sebuah agenda kolosal bernama Konferensi Islam Menyambut Ramadhan 1424 H. Temanya adalah “Menjaga Kesatuan Negeri-negeri Islam.” Konferensi tersebut diselenggarakan secara serentak di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar. Selain itu, dalam rangka memperingati 80 tahun runtuhnya khilafah Islamiyah, pada tanggal 20 Februari 2004, HTI menggelar aksi massa yang dihadiri sekitar 20.000 orang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi serupa juga digelar oleh para aktivis

¹³ *Ibid.* Hal 137

¹⁴ Al Wai'e, 2005

HTI di berbagai daerah di Indonesia. Aksi itu mengambil tema “Raih Kepemimpinan dan Tegakkan Syariah dan Khilafah”.¹⁵

Meski telah mendeklarasikan diri sebagai organisasi politik, HTI belum pernah berkompetisi bersama partai politik lain dalam pemilihan umum. Seperti halnya HT di negara-negara lain, organisasi ini masih mempertahankan suatu strategi gerakan politik yang cenderung bersifat tertutup. Salah satu bentuk ketertutupan itu, antara lain, adalah kenyataan bahwa mereka tidak pernah mengumumkan secara pasti struktur kepengurusan HTI dan figur-figur yang mengisinya. Sosok ketua umum HTI selalu misterius. Publik hanya disugahi seorang juru bicara yang bertugas menangani hampir semua urusan. Imdadun mencatat bahwa hal demikian ditujukan untuk mengantisipasi jika suatu saat HTI menghadapi represi penguasa¹⁶. Selain itu, seperti dicatat Abuza¹⁷, HTI juga merupakan partai yang sangat disiplin. Para anggotanya dibekali dengan kurikulum dua tahun yang sangat ketat, namun setelah magang selama tiga hingga enam bulan. Selama itu mereka akan diuji terus menerus keyakinan spiritual mereka. Partai ini juga tidak akan mentolerir setiap upaya pembelotan. Juru bicara HTI bernama Muhammad Ismail Yusanto, seorang insinyur lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dialah yang bertugas sebagai representasi HTI dalam berbagai forum, baik lokal maupun internasional. Wawasan keislaman Ismail didapat terutama dari Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta dan sejumlah pendidikan kaderisasi keislaman HTI. Selain aktivitasnya di HTI, Ismail adalah juga salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁸

Sementara itu ketua umum HTI saat laporan ini dibuat bernama Hafidz Abdurrahman. Pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, 10 Juli 1971, ini adalah lulusan Jurusan Bahasa Arab IKIP Malang dan Jurusan Akidah dan Pemikiran Islam University of Malaya.¹⁹

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Imdadun, *OpCit.* Hal 139

¹⁷ Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. London and New York: Routledge. 2007. hal 78

¹⁸ Wawancara dengan Ismail Yusanto

¹⁹ *Jawa Pos*, 19 Maret 2006

D. PROFIL GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Jika ada satu organisasi yang sangat berkepentingan dengan agenda nasionalisme di Indonesia, serta memperjuangkan kaum marhaen dan rakyat dari segala bentuk penindasan dan imperialisme, sudah pasti dapat dikatakan itu adalah Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Bagi GMNI, ajaran-ajaran tentang Marhaenisme dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh kader GMNI.

Adalah Bung Karno yang telah menginspirasi para kader GMNI tentang landasan organisasi tersebut. Ajaran-ajaran dan konsepsi Bung Karno tentang Marhaenisme dan Pancasila menjadi sebuah landasan organisasi yang dipegang teguh oleh kader GMNI.

Dalam Pidatonya di depan Konferensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1958, Bung Karno menyampaikan bahwa kaum marhaen terdiri dari tiga unsur, yaitu: unsure kaum proletar (buruh), unsur kaum petani melarat, dan unsur kaum melarat Indonesia yang lainnya. Sementara yang dimaksud kaum marhaenis adalah adalah “setiap pejuang dan setiap patriot bangsa” yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen itu dan yang bersama-sama dengan tenaga massa Marhaen itu hendak menumbangkan Sistem kapitalisme, Imperialisme, dan Kolonialisme, dan Yang bersama-sama dengan massa marhaen membangun negara dan masyarakat yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.²⁰

Sebagaimana ketika hubungan Indonesia-Malaysia memanas, terutama dengan dilanggarnya kedaulatan wilayah Republik Indonesia di blok Ambalat. GMNI bersikap keras dengan mengeluarkan pernyataan sikap dan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Kedubes Malaysia. Bagi GMNI, pelanggaran batas wilayah Republik Indonesia oleh Malaysia merupakan bentuk imperialisme dan mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia. GMNI adalah salah satu OKP yang merepresentasikan ideology nasionalisme dalam gerak langkahnya.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau disingkat GMNI, lahir sebagai hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi mahasiswa yang berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi itu ialah:

²⁰ www.gmnisurabaya.org/azas-perjuangan-gmni/

1. **GERAKAN MAHASISWA MARHAENIS**, berpusat di Jogjakarta
2. **GERAKAN MAHASISWA MERDEKA**, berpusat di Surabaya
3. **GERAKAN MAHASISWA DEMOKRAT INDONESIA**, berpusat di Jakarta.

Proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa mulai tampak, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.

Dalam satu rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, terdapat keinginan untuk mempersatukan ketiga organisasi yang seazas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat sambutan positif.

Setelah melalui serangkaian pertemuan peninjauan, maka pada Rapat Bersama antar ketiga Pimpinan Organisasi Mahasiswa tadi, yang diselenggarakan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai sejumlah kesepakatan antara lain:

1. Setuju untuk melakukan fusi
2. Wadah bersama hasil peleburan tiga organisasi bernama “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia” (GMNI).
3. Azas organisasi adalah: MARHAENISME ajaran Bung Karno.
4. Sepakat mengadakan Kongres I GMNI di Surabaya, dalam jangka waktu enam bulan setelah pertemuan ini.

Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:

Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka:

1. Slamet Djajawidjaja
2. Slamet Rahardjo
3. Heruman

Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis:

1. Wahyu Widodo
2. Subagio Masrukin
3. Sri Sumantri Martosuwignyo

Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia:

1. S.M. Hadiprabowo
2. Djawadi Hadipradoko
3. Sulomo

Dalam perjuangannya, GMNI menganut empat azas yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Marhaenisme
4. Pancalogi GMNI.

Adapun yang dimaksud dengan Pancalogi GMNI adalah lima prinsip yang harus menjadi jati diri bagi perjuangan anggota GMNI. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Ideologi artinya, perjuangan setiap anggota GMNI harus dilandaskan pada Ideologi yang menjadi Azas dan Doktrin Perjuangan GMNI, sebab ideologi merupakan acuan pokok dalam penentuan format dan pola operasional pergerakan.
2. Revolusi artinya, perjuangan setiap anggota GMNI harus berorientasi pada perombakan susunan masyarakat secara revolusioner. Revolusi bukan berarti pertumpahan darah, tetapi dalam pengertian pemikiran.
3. Organisasi artinya, perjuangan GMNI adalah perjuangan yang terorganisir, sesuai dengan azas dan doktrin perjuangan GMNI.
4. Studi artinya, sebagai organisasi mahasiswa, maka titik berat perjuangan GMNI adalah pada aspek studi. Amanat Penderitaan Rakyat harus dijadikan titik sentral dalam pendorong upaya studi ini.
5. Integrasi artinya, Perjuangan GMNI senantiasa tidak terlepas dari Perjuangan Rakyat Semesta. Setiap warga GMNI harus selalu berada ditengah-tengah Rakyat yang berjuang.

Saat ini, kepengurusan Presidium GMNI periode 2008-2010 dengan berdasarkan pada hasil kongres GMNI XVI di Bogor. Adapun susunan Pengurus Presidium 2008-2010 tersebut yaitu:

No	Nama	Jabatan	DPC Asal
1	Rendra Falentino	Ketua	GMNI Depok
2	Cokro Wibowo S	Sekretaris Jendral	GMNI Malang

3	Ekber L Watubun	Ketua Komite Organisasi	GMNI Ambon
4	Tengku Rully F.	Ketua Komite Ideologi & Politik	GMNI Bandung
5	Risky Alfarisi S.	Ketua Komite Kaderisasi	GMNI Medan
6	Bambang Wijaksono	Ketua Komite Hubungan Internasional	GMNI Purwokerto
7	Muhammad	Ketua Komite Advokasi Rakyat	GMNI Kota Tangerang
8	Husnul Hidayat	Ketua Komite Agitasi dan Propaganda	GMNI Garut
9	Robby Alexander S	Ketua Penelitian dan Pengembangan	GMNI Depok
10	Heni Lestari	Ketua Komite Gerakan Sarinah	GMNI Lampung
11	Sugeng Tri Handoko	Ketua Komite Pengorganisasian Mahasiswa dan Pelajar	GMNI Pekanbaru
12	Romadhon Taufik	Ketua Komite Pengorganisasian Organ Lintas Sektoral	GMNI Lubuk Linggau

E. PROFIL KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA

Perbincangan mengenai arah masa depan Hindu selalu menarik. Sebagai sebuah agama yang dianut oleh begitu banyak manusia dan mampu *survive* dalam waktu yang sangat panjang, tidak dapat dipungkiri bahwa Hindu telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi umat manusia. Sejarah Indonesia cukup banyak yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Hindu, yang walaupun seringkali dibantah oleh para pelaku sejarah, namun tidak terbantahkan dalam realitasnya. Sampai saat inipun beberapa aspek kehidupan sosial dan religius masyarakat luas masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu.

Seorang Mahatma Gandhi ketika memulai gerakan anti apartheid di Afrika Selatan pernah mengatakan, “Mereka tidak akan pernah tahu apa yang kita inginkan apabila kita tidak pernah mengatakan apa yang kita inginkan”. KMHDI didirikan untuk menyikapi kondisi ini. KMHDI sejak pendiriannya telah berketetapan hati akan memikul tanggungjawab atas pengembangan generasi muda Hindu. Sebagai organisasi kader, KMHDI akan menggembleng mahasiswa Hindu Indonesia di masa sekarang agar menjadi pemimpin di masa depan. KMHDI berpendirian bahwa generasi muda Hindu harus mampu menjadi corong bagi umat Hindu, sekaligus menjadi pionir dalam kemajuan bersama.

KMHDI sebagai sebuah organisasi kader, mengutamakan pendidikan bagi kader-kadernya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menimbulkan keinsyafan pada diri kader akan hak, kewajiban dan harga dirinya. Hanya kader-kader yang sadar dengan segala apa yang dilakukan, yang akan mampu merubah keadaan. Buruk baiknya nasib sang kader dan langkah-langkah yang akan dijalankannya untuk memperbaiki nasib tersebut harus merupakan pertimbangan dan perbuatan sendiri, dan bukan atas perintah dari luar. Kesadaran harus ditanamkan melalui pendidikan dan organisasi yang berdisiplin. Dengan cara meyakinkan, bukan dengan cara paksaan dan tipuan. Hanya dengan kesadaran sang kader, kekuatan moral dan mental serta kesadaran kader untuk bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukannya dapat dijalankan.

KMHDI berkeyakinan bahwa hanya dengan pembentukan kader-kader yang sadar akan jati dirinya sebagai manusia Hindu, masa depan umat Hindu yang lebih baik dapat terbayang di masa depan. Namun demikian, kebangkitan umat Hindu Indonesia yang tidak disertai dengan tanggungjawab terhadap seluruh bangsa Indonesia, justru akan menghancurkan ruang hidup umat. Untuk itu, kesadaran nasionalisme juga harus ditanamkan pada kader-kader KMHDI, dengan pemikiran, dimanapun kader KMHDI berada di wilayah politis Indonesia, semuanya adalah bagian dari tanah air Indonesia. KMHDI berpendirian bahwa tanah air ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia, tidak diperkenankan adanya klaim monopolistis dari satu golongan terhadap golongan yang lain. Walaupun keadaan saat ini belum seideal yang diinginkan, kader-kader KMHDI harus yakin bahwa masih ada hari esok, untuk itu KMHDI akan menyiapkan kader-kadernya untuk hari ini dan hari yang akan datang.

Dengan kesadaran pembentukan kader pada KMHDI, selain berkontribusi bagi pengembangan umat Hindu, secara otomatis kader-kader KMHDI akan ikut memberi kontribusi bagi tanah air tercinta. Dengan pendidikan bagi rakyat, yang sementara ini difokuskan pada kader-kader KMHDI, bangsa ini akan sanggup mandiri dan menentukan nasibnya sendiri tanpa didikte oleh bangsa lain.

Memasuki awal tahun 1990-an, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui

PUOK ini, ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswa intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Situasi mahasiswa Indonesia di tanah air, sebagaimana yang disebutkan di atas, membawa pengaruh yang besar pada mahasiswa Hindu di awal dekade 90-an. Mahasiswa Hindu yang pada saat tersebut telah memiliki jaringan informasi internal yang bersifat informal di antara beberapa organisasi mahasiswa Hindu yang terpisah-pisah, akhirnya tergerak untuk membuat suatu jaringan informasi yang permanen di antara mereka.

Setelah jaringan informasi mahasiswa Hindu Indonesia makin solid, para pelaku pertukaran informasi di dalamnya (yang notabene adalah para ketua organisasi mahasiswa Hindu lokal), memunculkan suatu keprihatinan tentang ketiadaan suatu organisasi mahasiswa Hindu yang bersifat formal dan sekaligus berjangkauan nasional. Ketiadaan organisasi ini, membuat aspirasi mahasiswa Hindu Indonesia tersumbat, dan seringkali terpaksa disalurkan melalui organisasi-organisasi lain yang bukan khas mahasiswa Hindu. Akhirnya, masa-masa awal dekade 90-an menjadi masa-masa pematangan ide tentang suatu organisasi Mahasiswa Hindu Indonesia yang berjangkauan nasional.

E.1. Tahap Pemunculan Ide

Tahap ini ditandai dengan munculnya keinginan untuk membentuk wadah Mahasiswa Hindu Indonesia ke dalam satu wadah yang bersifat nasional di Yogyakarta pada saat panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Nasional pada tahun 1991. Waktu itu diusulkan bentuk forum komunikasi informal, dan disepakati KMHD UGM sebagai fasilitator. Tugas dari forum komunikasi tersebut adalah untuk membangun jaringan komunikasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bagi perguruan tinggi yang belum memiliki KMHDI di perguruan tingginya, diserukan agar segera membentuk KMHD yang bisa mengakomodasikan seluruh potensi dan aspirasi Mahasiswa Hindu di masing-masing perguruan tinggi. Dalam perjalanannya Forum Komunikasi banyak menemui kendala sehingga komunikasi mahasiswa Hindu Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan.

E.2. Tahap Pematapan Ide

Menyadari kendala yang dihadapi oleh Forum Komunikasi tersebut, dilakukan pembicaraan lebih lanjut dalam Dialog Mahasiswa Hindu yang diselenggarakan pada saat TPKH ITS menyelenggarakan Seminar Nasional Mahasiswa Hindu pada tahun 1992. Adapun hasil yang dicapai pada saat itu adalah dibentuknya Koordinator Wilayah (Korwil) di masing-masing kota yang memiliki perguruan tinggi. Selain itu, untuk membicarakan mekanisme kerja Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu, maka akan diadakan Dialog di Bali dengan tetap menunjuk KMHDI UGM sebagai fasilitator dan penyelenggara. Untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan di ITS, pada tanggal 3 - 4 Agustus 1992 KMHD UGM bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Warmadewa menyelenggarakan Panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membahas mekanisme kerja dan biaya operasional dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hindu Indonesia. Pada saat inilah muncul usulan untuk membentuk wadah yang bersifat Formal dan Nasional. Usulan tersebut dilontarkan pertama kali oleh KPMHD Malang selaku Korwil Malang.

Untuk menindaklanjuti hasil Dialog di Universitas Warmadewa, pada tanggal 9 - 11 Oktober 1992 diadakan Malang Informal Meeting (MIM) yang bersamaan dengan kegiatan Dharma Bakti VIII KPMHD Malang. Tujuan utama dari MIM adalah untuk menyamakan Visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentuk serta membuat rancangan materi untuk keperluan Konggres. Keputusan penting yang dihasilkan pada saat MIM adalah sebelum Konggres perlu diadakan Pra Konggres yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa Hindu dalam menyelenggarakan Konggres.

E.3. Tahap Penyamaan Visi

Pada tanggal 25 - 28 Desember 1992 diadakan Urun rembuk Nasional di kampus IHD Bali (UNH) yang merupakan istilah lain dari Pra Konggres seperti yang dimaksudkan dalam MIM. Urun rembuk ini lebih bersifat kekeluargaan untuk lebih mematangkan Pelaksanaan Konggres. Namun pada urun rembuk ini kembali timbul perbedaan visi dan persepsi tentang wadah yang akan dibentuk. KMHD UGM tetap menghendaki wadah yang bersifat informal sedang delegasi lainnya menghendaki wadah yang bersifat formal berbentuk sebuah Organisasi.

Setelah melalui perdebatan yang panjang maka KMHD UGM mengambil sikap *walk out*.

Dalam rangka mewujudkan keinginan untuk membentuk wadah bersama secara formal, maka diputuskan:

1. Pelaksanaan Konggres diundur sampai bulan September 1993.
2. Tempat Konggres tetap di Bali.
3. Untuk membahas rancangan AD/ART, GBHO dan Program Kerja maka diadakan pertemuan lanjutan di Bali.
4. Pembiayaan Konggres ditanggung bersama oleh seluruh Korwil, dan Panitia.
5. Dibentuk Tim Investigasi yang bertugas untuk mempelajari dan mendapatkan informasi mengenai kondisi Mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia.

Kemudian pada tanggal 8 - 10 dan 14 - 15 Februari 1993 bertempat di Sekretariat Panitia Konggres, Jl. Ir. Ida Bagus Oka No. 5, diadakan Bali Informal Meeting (BIM). Hasil penting BIM adalah :

1. Nama Organisasi yang diusulkan pada konggres adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, disingkat KMHDI.
2. Akan diadakan pertemuan lanjutan di Bandung.
3. Penegasan bahwa biaya konggres ditanggung bersama.
4. Menugaskan untuk Korwil Bali dan NTB untuk membuat rancangan Program Kerja, dan Korwil Malang untuk membuat rancangan GBHO.
5. Hal-hal yang belum dibahas dalam BIM akan dibahas dalam pertemuan di Bandung.
6. Masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengirimkan kalender akademik, untuk mencari waktu yang tepat tentang pelaksanaan konggres.

E.4. Kongres Nasional Mahasiswa Hindu Indonesia

Konggres ini merupakan puncak dari seluruh pertemuan dan pembahasan sebelumnya. Konggres berlangsung dari tanggal 1 - 4 September 1993. Pada intinya kegiatan ini bermaksud untuk membentuk wadah nasional bagi Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan sekaligus memilih Pengurus Pimpinan Pusat periode 1993 - 1996. Konggres pada akhirnya menghasilkan lima Ketetapan, lima

Keputusan dan satu Keputusan Khusus, memilih dan menetapkan Susunan Pengurus Inti yang terdiri dari tiga orang, yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum KMHDI.

Dan saat ini, kepengurusan KMHDI dipimpin oleh Gede Darma, setelah sebelumnya dipimpin oleh I Wayan Sudane.

F. PENUTUP

Pemuda adalah modal sosial, agen perubahan dan pemegang kebijakan masa depan sebuah negara. Oleh karenanya sebagai kategori sosial, pemuda harus selalu bergerak melakukan kerja sosial dan perubahan, disamping mempersiapkan diri dengan perangkat intelektual. Kini pemuda di seluruh belahan bumi, di setiap negara ditantang oleh kenyataan yang melanda negeri-negeri masing-masing yang tidak luput dari berbagai persoalan dalam berbagai aspek.

Komponen kualitas intelektual pemuda, ideologi, dan kelembagaan akan sangat menentukan kualitas pemuda di masa depan. Kualitas intelektual pemuda adalah *ration de' etre* untuk menelaah dan menganalisis setiap kejadian, karena ketajaman intelektual akan menggugah kesadaran nurani. Intelektual yang hakiki tidak akan pernah berhenti berpikir, akan peka terhadap lingkungan sekitarnya, serta bersedia memberikan solusi alternatif dalam memecahkan berbagai problema.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Mundurnya Soeharto mengakhiri kekuasaan diktatorial terlalu lama dalam sejarah politik di Asia Tenggara. Dalam telaah teori-teori politik kontemporer masa keruntuhan rezim otoriter menjadi awal bagi hadirnya suatu fase yang disebut transisi demokrasi. Fase transisi demokrasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya kebebasan politik, desentralisasi, dan liberalisasi ekonomi. Fase transisi ini disebut juga masa reformasi. Hal ini mengakhiri masa panjang rezim otoriter yang ditandai dengan sentralisasi dalam segala rupa bidang. Termasuk didalamnya wacana nasionalisme Indonesia. Jika di masa orde baru, wacana nasionalisme didominasi oleh negara, maka nasionalisme pasca reformasi lebih beragam dan terbangun atas kesadaran masyarakat sipil. Atau kita bisa menyebutnya nasionalisme doktriner menuju nasionalisme kesadaran.

Nasionalisme statis orde baru menekankan bahwa tujuan pembangunan suatu bangsa adalah memperkuat negara dan menyatukan masyarakat dalam naungan negara yang terpusat. Inilah watak nasionalisme integrasionis Indonesia selama bertahun-tahun. Sementara nasionalisme Indonesia setelah reformasi dicirikan ditandai oleh delegitimasi negara, baik oleh konteks eksternal maupun internal. Dalam ranah eksternal, globalisasi dan neoliberalisme memaksa negara yang mulai lemah untuk tunduk pada kepentingan-kepentingan kapital dan lembaga-lembaga internasional penopangnya. Secara internal, kebangkitan masyarakat sipil membuat negara harus membagi perannya dan mengurangi kekuasaannya. Berbagai organisasi masyarakat sipil mulai bekerja dan mengambil alih sebagian peran yang dulu dimainkan oleh negara. Berbagai organisasi masyarakat sipil dengan latar belakang ideologi dan jaringan yang beragam memiliki peran penting dalam menebarkan diskursus baru tentang nasionalisme yang lebih beragam.

Anasir-anasir pendukung diskursus nasionalisme pasca reformasi adalah globalisasi dan neoliberalisme; Islam sebagai sebuah ideologi politik; dan politik

identitas dari bangkitnya kelompok-kelompok minoritas dan marjinal. Bab ini akan mendiskusikan bagaimana transformasi dari diskursus nasionalisme statis yang diterapkan di masa orde lama dan orde baru kepada nasionalisme pasca reformasi. Selain itu, bab ini juga menganalisa diskursus nasionalisme Indonesia di tataran OKP berdasarkan empat pisau analisa, yaitu: gagasan OKP tentang Indonesia, gagasan OKP tentang Nasionalisme, gagasan OKP tentang Identitas Nasional, dan gagasan OKP tentang negara-bangsa

B. REZIM OTORITER DAN NASIONALISME DOKTRINASI

B.1. Warisan Demokrasi Terpimpin

Sejarah otoritarianisme di negara Indonesia dimulai setelah Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut berisi pembubaran Konstituante dan pembekuan Konstitusi UUDS 1950. Dekrit tersebut mengakhiri 14 tahun instabilitas politik yang diakibatkan oleh sistem demokrasi yang disebut liberal. Sistem demokrasi parlementer-liberal yang menimbulkan instabilitas berkepanjangan tersebut menjadi bukti tentang kelebihan kekuatan bangsa dan masyarakat dibandingkan kekuasaan negara. Negara dalam era demokrasi liberal tercabik-cabik oleh berbagai konflik politik dan militer yang berkepanjangan.

Kelemahan negara terjadi pada tiga dimensi sekaligus; militer, ekonomi, dan birokrasi. Secara militer, konflik-konflik dalam tubuh militer terus berlanjut mulai pemberontakan DI/TII di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; pemberontakan Republik Maluku Selatan; hingga puncaknya pemberontakan PRRI tahun 1957. Secara ekonomi, negara mewarisi ekonomi yang remuk pasca perang, hutang yang melimpah, dan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang dimonopoli asing. Hingga tahun 1957, sejumlah korporasi besar Belanda masih menguasai sector-sector produktif dan perkapalan antar pulau. Industri minyak juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Amerika, dan Inggris.

Dalam hal birokrasi juga demikian. Aparatus pemerintahan dari tingkat atas hingga bawah banyak diisi oleh para aktivis partai politik, militer, dan organisasi primordial yang membangun kesetiaan bukan kepada negara, namun kepada kelompok-kelompok mereka sendiri. Selain itu, jumlah aparat yang sangat tambun

dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas untuk menggaji membuat kinerja birokrasi sama sekali tidak efektif dan efisien.

Dalam suasana negara yang lemah tersebutlah, Soekarno sebagai pemimpin kharismatik mengambil inisiatifnya. Ia mengampanyekan kembali suatu revolusi nasional dan berambisi menyatukan kekuatan-kekuatan bangsa yang terpecah ke dalam negara dengan dia sebagai pemimpin besar. Berbagai proyek nasionalisme dilancarkan Soekarno dalam rangka menghimpun kekuatan negara-bangsa.

Setelah sukses menjalin aliansi dengan tentara lewat penumpasan pemberontakan PRRI, pada tahun 1962 ia menarik patriotisme mereka dan, tentunya, seluruh warga bangsa dengan operasi perebutan Irian Barat dari Belanda. Patriotisme juga dibangkitkan dengan berbagai gerakan perlawanan anti-asing lainnya seperti kampanye konfrontasi dengan Malaysia, nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta milik asing, kebijakan anti modal asing, dan pengeluaran Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awal 1965. Ia menyebut kapitalisme dan negara-negara Barat sebagai *Old Established Forces* (Oldefos) yang eksploitatif, imperialis, dan menindas. Oleh karena itu, ia menggalang aliansi dengan Negara-negara-bangsa dunia ketiga yang ia sebut *New Emerging Forces* (Nefos).

Menurutnya, Indonesia adalah suatu kekuatan utama dalam memimpin gerakan radikal melawan imperialisme.¹ Dalam menengahi berbagai friksi ideologi politik, ia mengampanyekan penyatuan ideologi-ideologi dengan program NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Ini adalah manifestasi kebencian Soekarno terhadap system multipartai dan demokrasi parlementer. Menurutnya, demokrasi parlementer adalah demokrasi yang terlalu berwajah Barat dan tidak sesuai dengan situasi Indonesia.² Nasakom sendiri adalah gabungan ideologi dari tiga kekuatan politik dominan saat itu, yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI), partai Islam tradisional Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebelumnya, pada tahun 1960, ia telah membubarkan dua partai radikal yang selama ini sulit berkompromi dengannya;

¹ Elson, R. E. *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press 2008. hal 233; Anderson, Benedict R.O.G. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (terj. Revianto Budi Santoso). Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000. hal 235

² Elson. *Ibid*

yakni Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kampanye nasakomisasi ini juga dilangsungkan di kalangan militer dan birokrasi.

Alih-alih membuat negara semakin kuat, yang terjadi justru kerusakan yang semakin parah. Ekonomi mengalami kinerja yang paling buruk dalam sejarah. Berbagai perusahaan yang dikuasai dan dikendalikan oleh militer yang kurang berpengalaman mencatat prestasi korupsi dan kerugian yang parah. Sejumlah kebijakan ekonomi dan moneter yang diambil justru mengakibatkan tekanan finansial yang hebat. Antara awal 1962 hingga 1965, nilai tukar rupiah untuk satu dolar Amerika berubah dari Rp. 470 menjadi Rp. 50.000. Terjadi hiperinflasi yang dahsyat.³ Nasionalisasi ekonomi juga membawa dampak pada diskriminasi etnis Tionghoa. Meski Soekarno berkali-kali menegaskan bahwa Indonesia adalah totalitas yang tidak mengakui pribumi atau non-pribumi, etnis Tionghoa tak bisa melepaskan diri dari label “asing” yang tidak boleh bermain dalam ekonomi domestik. Sejumlah perusahaan milik para pengusaha Tionghoa diduduki oleh militer. Pada tahun 1960 sekitar 100.000 warga Tionghoa direpatriasi ke Tiongkok. Yang masih tersisa berupaya melakukan asimilasi dengan hal-hal seperti memberi nama anak-anak mereka nama-nama berbau Indonesia. Dalam keadaan ini PKI mengambil posisi paling tegas. Pemimpin PKI D.N. Aidit menyatakan bahwa “PKI tidak berdiri untuk politik asimilasi untuk kalangan Tionghoa, namun politik integrasi”.⁴ Hal itu yang kemudian banyak membuat warga Tionghoa aktif dalam PKI.

Sementara itu, kampanye nasakomisasi hanya efektif di kalangan elite. Di kalangan arus bawah konflik-konflik sosial yang diakibatkan oleh perpecahan ideologis terus berlangsung. Perpecahan ideologis ini juga semakin menjalar di tubuh militer. Pada 30 September 1965, konflik di tubuh militer berujung pada percobaan kudeta yang gagal. PKI banyak disebut-sebut ada di balik upaya ini. Sejumlah petinggi militer terbunuh dalam peristiwa tersebut. Soekarno yang semakin otoriter juga telah menebar antipati di masyarakat dan secara politik bertambah kurang populer. Berbagai demonstrasi digelar demi menuntut sang Presiden mundur. Kedekatannya dengan PKI juga menambah ketidakpopulerannya di mata publik. Berbagai teori bahkan mengaitkannya

³ Anderson. *Ibid.* 2000

⁴ Elson. *Ibid.* 2008

dengan peristiwa PKI dalam tentara tersebut. Pada tahun 1967, MPRS yang beberapa tahun sebelumnya mengeluarkan ketetapan tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup mencabut ketetapan itu dan memakzulkannya dari kursi kepresidenan. Inilah akhir dramatis dari perjalanan otoritarianisme generasi pertama. Sebuah upaya integrasi negara-bangsa yang gagal.

B.2. Orde Baru dan Integralisme Negara-bangsa

Negara demokrasi dipimpin terbukti gagal mengontrol kekuatan-kekuatan bangsa yang terus aktif dan dinamis dalam wilayah teritorialnya. Proyek pembentukan negara-bangsa yang integralistik dilanjutkan oleh negara orde baru. Anderson menyebut Orde Baru sebagai “kebangkitan kembali negara dan kemenangannya atas masyarakat dan bangsa.” Basis kemenangan ini adalah kemampuan Soeharto menempatkan diri sebagai pahlawan dalam situasi sosiopolitik yang mengidentifikasi adanya musuh bersama bernama PKI. Wacana tentang musuh bersama ini dirawat hingga ia terbukti mampu memusnahkannya berikut sekutu-sekutunya dan, dengan demikian, memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari rakyat. Selain itu, kepemimpinan Soeharto juga ditandai dengan adanya gerakan *people's power* yang menghendaki dihancurkannya negara lama dan penciptaan suatu negara baru yang lebih menjanjikan perubahan. Berbagai demonstrasi dan gerakan massa yang terjadi di berbagai pelosok negeri pasca peristiwa 30 September 1965 secara tidak langsung telah memberi Orde Baru legitimasi sebagai pengendali baru negara-bangsa. Adanya gerakan *people's power* yang melimpahkan dukungan pada kepemimpinan Soeharto juga menjadi pertanda kesatuan aspirasi dari segenap elemen bangsa bagi pembentukan suatu negara yang dikehendaki bersama.

Soeharto dengan sangat baik membaca berbagai tanda ini dan sangat percaya diri dengan kekuasaan barunya. Istilah orde baru dan orde lama yang diberikan oleh rezim baru tersebut juga menjadi pertanda suatu demarkasi antara negara lama dan negara baru. Orde Baru mewarisi dua sejarah; demokrasi parlementer yang menimbulkan instabilitas politik dan demokrasi dipimpin yang menghasilkan slogan-slogan kosong dan romantisme. Jika Soekarno menanggapinya dengan pembubaran sistem multipartai, maka Soeharto melihat

bahwa solusi bagi instabilitas politik tersebut adalah mengakhiri polemik tentang ideologi. Dalam sebuah pidato di bulan Agustus 1967, Soeharto menyatakan bahwa diskusi tentang ideologi tidak lagi relevan karena “kita telah memiliki sebuah ideologi, Pancasila.” Ia menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari semua gagasan tentang apa yang kita anggap sebagai wujud yang benar dari masyarakat, yang menjamin perdamaian di antara kita semua.” Pancasila adalah “realisasi dari identitas seluruh bangsa Indonesia”⁵. Pancasila kemudian menjadi diskursus yang membingkai Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa. Sebagai upaya membatasi aspek traumatik dari pengalaman demokrasi parlementer, orde baru benar-benar mengawasi politik. Soeharto mengungkapkan gagasan tentang ‘konsensus nasional’ yang mencakup perubahan total terhadap struktur politik lama. Soeharto menganggap bahwa persaingan ideologis adalah model yang tidak cocok dengan politik untuk Indonesia. Politik, menurut Soeharto, bukan menyangkut persaingan ide, melainkan lebih merupakan pengelolaan proses untuk sampai pada suatu konsepsi yang telah ada dan disepakati bersama. Dalam sebuah pidato Soeharto mengatakan: ‘tujuan kita tidak lebih daripada memanggungkan seluruh kalangan, kelompok, kekuatan, dan generasi daripada bangsa kita dengan dasar, ideologi, dan ideal dari negara kita. Dengan cara ini kita bisa melindungi segenap rakyat, kelompok, dan kekuatan daripada negeri kita baik dari konflik maupun ketegangan internal yang menjadi sumber perpecahan dan luka nasional’.⁶ Diskursus tentang persatuan dan kesatuan nasional ini semakin lantang disuarakan oleh orde baru. Ideologi Pancasila sebagai jangkar integrasi keindonesiaan disebarkan melalui berbagai indoktrinasi. Pada tahun 1978, rezim secara resmi meluncurkan tafsir standar atas Pancasila yang disebut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pedoman ini awalnya diperuntukkan sebagai materi pelatihan para pegawai negeri sipil dan warga masyarakat lainnya mengenai makna hakiki dari Indonesia dan jalan yang ditempuh oleh bangsa ini. Ali Moertopo menyebutnya “untuk mengindonesiakan orang Indonesia”.⁷ Dalam berbagai kesempatan di tahun 1982, Soeharto menyampaikan pemikiran tentang

⁵ *Ibid.* Hal 243

⁶ Bertrand, Jaques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004

⁷ Bertrand. *Ibid.* Hal 76; Elson. *Ibid.* Hal 248.

perlunya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan politik.

Wacana itu terus digulirkan dan baru direalisasikan lewat pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang keormasan. Bagi Soeharto, “Bagi kami, Pancasila adalah soal hidup dan mati daripada bangsa Indonesia.” Negara pada gilirannya menjadi jangkar integralistik dari negara orde baru. Dengan menjadikan Pancasila yang telah diberi tafsir standarnya sebagai satu-satunya ukuran keindonesiaan, maka klaim anti-Pancasila berarti pula tuduhan anti nasionalis, pengkhianat negara sekaligus bangsa. Legitimasi Orde Baru yang begitu kuat membuat ideologisasi Pancasila ini awalnya tidak mendapatkan tentangan berarti. Namun, pada perkembangannya, ia memicu reaksi yang keras dari berbagai golongan dalam masyarakat, terutama Islam. Pada bagian lain dari tulisan ini akan dibahas tentang hal itu.

Yang patut dicatat, dengan berakhirnya polemik ideologi, negara-bangsa baru ini pun berupaya menjawab warisan kedua dari demokrasi terpimpin berupa slogan-slogan romantis tentang nasionalisme. Soeharto ingin membuktikan bahwa negara orde baru mampu memimpin proyek yang dilewatkan oleh pendahulunya; membangun negara yang kuat demi mewujudkan cita-cita bangsa.

Sebagai seorang jenderal, Soeharto mampu mengonsolidasikan barisan militer di bawah kekuasaannya. Penguatan militer ini menjadi penting karena institusi inilah yang dapat diandalkan untuk mengatasi berbagai warisan instabilitas politik yang dibawa oleh rezim sebelumnya. Soeharto sengaja memberi berbagai fasilitas dan priviledj yang besar kepada institusi ini. Selain penempatan sejumlah petinggi militer dalam pos-pos kabinet, kepemimpinan sejumlah perusahaan milik Negara juga diberikan kepada mereka. Dalam rezim Soeharto, tentara menganut doktrin dwifungsi; fungsi sebagai alat pertahanan negara dan fungsi sebagai bagian dari kelompok fungsional yang memiliki peran politik sebagai sarana mencapai tujuan revolusi. Sebagai implementasi dari doktrin dwifungsi ini negara memberi hak 100 kursi gratis di parlemen. Berbagai priviledj yang diberikan kepada tentara ini membuatnya semakin kuat dan memiliki loyalitas tinggi kepada negara yang kini dipersonalisasi oleh Soeharto. Militer inilah yang menjadi alat penyebar dan penjaga ideologi negara Pancasila paling

andal. Selain itu, institusi inilah yang mengawal proyek pembangunanisme orde baru yang menuntut stabilitas politik dan sosial yang tinggi. Tidak seperti kampanye nasionalisme ekonomi Soekarno, stabilitas yang ditopang oleh tentara menghadirkan suatu versi lain dari nasionalisme ekonomi yang terbungkus dalam doktrin pembangunanisme.

Misi utama orde baru seperti ditegaskan oleh Ali Moertopo adalah “mengisi kemerdekaan nasional dengan cara menggalakkan pembangunan di segala bidang.” Orde Baru, seperti diungkap Sultan Hamengku Buwono IX, meyakini bahwa “kehidupan politik yang sehat adalah mustahil tanpa suatu ekonomi yang kuat”⁸. Berkebalikan dengan Soekarno yang menolak modal asing, awal orde baru adalah berkah bagi para investor asing. Soeharto segera membawa orde baru ke dalam pusaran ekonomi kapitalis global dalam rangka menunjukkan berbagai kelemahan kebijakan ekonomi Soekarno. Soeharto segera membentuk tim ekonomi berwawasan internasional yang dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro. Tugas utama para teknokrat ekonomi di awal orde baru memang menurunkan hiperinflasi. Bagi Widjojo, dukungan dari luar negeri sangat penting bagi pembangunan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa menarik simpati kekuatan kapitalis Barat dan Jepang. Soeharto segera mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, mengembalikan perusahaan yang dinasionalisasikan kepada pemilik awal dan pembuatan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang longgar pada tahun 1967, rasionalisasi perbankan dan tingkat suku bunga pada tahun 1968, dan lain sebagainya. Hingga tahun 1968, lebih dari setengah milyar dolar dalam bentuk bantuan telah diraup. Saat bonanza minyak pada tahun 1973 negara mendapat untung berlipat-lipat dari kebijakan OPEC menaikkan harga minyak dunia. Hingga pada tahun itu, Orde Baru sangat bersahabat dengan perusahaan multinasional.⁹

Pada awal 1970-an, Soeharto telah berhasil menyulap kota-kota besar di Indonesia menjadi penuh gemerlap. Gedung-gedung pencakar langit mulai berdiri dengan tegap, mal-mal tempat belanja mulai berdiri dan sangat ramai, dan tempat-tempat hiburan juga dibangun. Sampai pada suatu pagi tanggal 15 Januari 1974 digelar demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang memakan korban. Peristiwa itu

⁸ Elson. *Ibid.* Hal. 272

⁹ Anderson. *OpCit.* 2000

lazim dikenal sebagai malapetaka limabelas januari (malari). Mereka menolak terlalu melimpahnya modal asing dan maraknya korupsi di birokrasi sebagai kesalahan arah strategi pembangunan orde baru. Peristiwa itu mulai mengubah kebijakan ekonomi negara orde baru.¹⁰ Seminggu setelah Malari, tanggal 22 Januari 1974 Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional – sebuah dewan yang beranggotakan menteri-menteri inti dan bersidang tiap hari Selasa di bawah pimpinan Presiden – melangsungkan sidang istimewa. Sidang menghasilkan suatu Keputusan Presiden yang mengubah cara kerja sistem Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sistem PMA akhirnya lebih membatasi partisipasi modal asing dan mengharuskan semua investasi asing baru untuk menggunakan bentuk usaha patungan hanya dengan mitra dan dirintis upaya-upaya untuk mempercepat pengalihan sahamnya kepada orang-orang pribumi itu. Dalam kaitannya dengan program PMDN, pemerintah menetapkan definisi yang terbatas untuk mendefinisikan “usaha pribumi” guna mempercepat perubahan perimbangan kepemilikan *equity* (saham biasa) yang menguntungkan partner pribumi. Keputusan baru itu juga menentukan bahwa kredit investasi dalam negeri (PMDN) hanya akan diberikan kepada orang-orang Indonesia, artinya orang pribumi.¹¹

Soeharto memulai suatu era Indonesianisasi ekonomi. Program ini lebih dikembangkan lagi pada tahun 1979 ketika pemerintah mengeluarkan Keppres No. 14 yang kemudian diubah menjadi Keppres No. 14A pada bulan April 1980. Keppres itu memberi banyak kemudahan kepada para pengusaha pribumi untuk memperoleh kontrak-kontrak pemerintah. Pasal 19 Keppres tersebut menyatakan bahwa kontrak atau pembelian yang nilainya di bawah Rp 20 juta harus diberikan kepada perusahaan setempat dari golongan ekonomi lemah. Tender terbuka bagi perusahaan domestik dan asing hanya diperuntukkan bagi kontrak di atas Rp 200 juta. Keppres itu juga mendefinisikan siapa yang dimaksud perusahaan “golongan ekonomi lemah” di atas. Mereka adalah perusahaan-perusahaan di mana 50% atau lebih dari saham modal yang sudah disetor (*paid up capital*) berada di tangan

¹⁰ Raillon, Francois. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES. 1985. hal 337

¹¹ Muhaimin, Yahya A. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES. 1990. Hal 207

pribumi, dan lebih dari separuh anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi terdiri dari orang pribumi (*ibid*). Kebijakan-kebijakan ekonomi orde baru semakin memberi legitimasi integralisme negara-bangsa orde baru di kalangan para pegiat ekonomi. Kebijakan ini menciptakan suatu neopatrimonialisme di antara negara yang direpresentasikan oleh birokrasi dan militer di sebagai patron dan para pengusaha sebagai klien.

Kebijakan tersebut memang meningkatkan secara tajam jumlah pengusaha pribumi, namun membuat mereka sangat tergantung kepada negara. Selain itu, meski kebijakan tersebut bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, namun para pengusaha Tionghoa banyak menyiasatinya dengan membuat perusahaan patungan model Ali-Baba dengan pengusaha pribumi dan menjalin kedekatan dengan elite birokrasi tertentu. Implikasi dari hal ini adalah meski pengusaha pribumi meningkat tajam namun sektor usaha mereka terbatas pada usaha konstruksi yang tidak memerlukan jaringan kegiatan usaha yang luas dan kompleks.¹² Mereka tetap saja tidak mampu bersaing dengan para pengusaha Tionghoa yang lebih mampu secara modal, organisasi, dan teknologi. Namun, itu bukanlah soal bagi negara. Yang jelas, ia telah mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonomi di bawah kakinya.

C. KRISIS NASIONALISME DOKTRINASI

Negara orde baru mampu tampil sebagai negara paling kuat sepanjang sejarah Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara demokrasi terpimpinnya Soekarno, maka kekuatan orde baru bukanlah tandingannya. Secara militer, untuk pertama kalinya negara orde baru berhasil mengonsolidasikan institusi ini dari perpecahan internal yang terus berlangsung sebelumnya. Meskipun persaingan di tubuh militer juga terjadi, namun semuanya tunduk di bawah satu komando sang panglima tertinggi. Pada level birokrasi, Soeharto juga mampu membangun birokrasi yang kokoh dan solid. Birokrasi bahkan menjadi salah satu mesin utama penopang kekuasaannya sepanjang tiga dekade. Lewat Golkar, ia mampu menghimpun birokrasi sebagai kekuatan politik tersendiri. Tiada lagi multiloyalitas seperti yang terjadi pada birokrasi Soekarno. Pada tingkat

¹² *Ibid*

masyarakat sipil, stabilitas politik, ekonomi, ditambah kekuatan represif tentara mampu menciptakan kehidupan sipil paling tertib dan kondusif dalam sejarah.

Negara orde baru telah membangun negara yang mampu memanggalkan Negara dan bangsa, negara, dan rakyat. Namun, integralisme orde baru tidak sekokoh yang dibayangkan. Ideologisasi Pancasila mendapatkan tentangan dari kelompok-kelompok Islam yang mulai bangkit kembali. Pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Ormas yang memuat ketentuan tentang asas tunggal Pancasila mendapat reaksi keras dari kalangan Islam. Berbagai gerakan demonstrasi digelar sepanjang tahun 1978 mengakibatkan sejumlah aktivis muslim ditangkap. Mereka mengatakan bahwa dengan menjadikannya asas tunggal pada akhirnya Pancasila akan menjadi semacam agama baru yang menggantikan Islam. Sebagian dari mereka bahkan menganggap penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila sebagai bentuk kekufuran dan kemusyrikan¹³.

Sejak awal Islam memang menjadi ganjalan utama bagi proyek integralisme orde baru. sejak penyederhanaan organisasi politik menjadi tiga organisasi pada tahun 1975 dan kooptasi negara yang kuat terhadap ketiganya, para aktivis politik Islam semakin gencar melancarkan aktivitasnya. Aksi-aksi kekerasan seperti pengeboman gereja hingga teror lewat selebaran yang mengatasnamakan diri kelompok Islam telah mulai marak sepanjang dekade 1970-an. Terhadap berbagai gerakan tersebut negara bersikap sangat represif¹⁴. Mulai awal 1980-an, di berbagai perguruan tinggi umum, terutama seiring dengan pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NK), aktivitas keislaman lewat gerakan usroh juga mulai marak. Kegiatan mereka adalah seputar pengajian lewat forum-forum halaqah dan penerbitan buku-buku keislaman.

Meski menggeluti ideologi yang sama dengan para pendahulu radikal mereka, kelompok ini relatif terbebas dari represi rezim karena menjauhi aktivitas politik¹⁵. Gejala gairah keislaman yang semakin berkembang ini menarik minat rezim. Menjelang awal dekade 1990-an, terjadi perubahan arah kebijakan Soeharto terhadap Islam. Rezim orde baru berubah menjadi lebih islami. Berbagai

¹³ Mubarak, M Zaki. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES. 2008. hal 91

¹⁴ *Ibid.* Hal 72

¹⁵ *Ibid.* Hal 98-99

kebijakan berwajah islami dikeluarkan mulai pengesahan UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama; UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempertahankan pengajaran agama di sekolah; pengesahan UU Perbankan yang mengizinkan bertumbuhnya bank-bank syariah; penghapusan larangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Dari berbagai kebijakan pro Islam yang dikeluarkan negara orde baru, dua hal yang paling fenomenal adalah kepergian Soeharto dan keluarga ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji serta pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1991 yang dipimpin oleh orang dekat Presiden, B.J Habibie. Sebagai organisasi Islam yang disponsori negara, keanggotaan dan kepengurusan ICMI segera menyebar ke berbagai daerah. ICMI juga berperan besar dalam melakukan islamisasi birokrasi. Kebijakan pro Islam yang sangat vulgar ini memicu sektarianisme baru yang memukul balik negara. Di tubuh birokrasi dan tentara, dua institusi penopang penting rezim, terjadi persaingan tidak sehat dan berujung perpecahan antara mereka yang “merah” dan “hijau”¹⁶.

Islamisasi juga membuat pemersoalan kembali Pancasila sebagai ideologi. Namun, kali ini muncul dari kelompok Pancasila-lais. Kelompok-kelompok oposisi dari kalangan sekuler atau Islam moderat mulai menemukan sasaran ideologis untuk menyerang rezim, Pancasila. Abdurrahman Wahid, pemimpin organisasi oposan Forum Demokrasi dan ketua ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama mengancam sektarianisme yang lahir dari program islamisasi tersebut. Menurutnya, akomodasi rezim yang berlebihan terhadap kelompok Islam, termasuk mereka yang terkategori garis keras sangat berbahaya dan berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara¹⁷. Program Islamisasi itu pada gilirannya memang membangkitkan kembali polemik lama tentang ideologi yang sebelumnya dikubur oleh orde baru. Para oposan nasionalis dan Soekarno-is mulai muncul ke permukaan dan menciptakan suara-suara minor bagi rezim. Di penghujung kekuasaan rezim distingsi polemik ideologi ini akan semakin mengkristal.

Selain Islam, tantangan besar terhadap nasionalisme statis rezim datang dari segregasi kultural yang selama ini diabaikan baik dalam retorika bhineka tunggal

¹⁶ Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and The Ideology of Tolerance*. London: Routledge. 1995

¹⁷ Mubarak. *Opcit*. Hal 103; Ramage. *Ibid*. Hal 39

ika maupun oleh pendekatan represif militer. Di kalangan anak bangsa terdapat sentimen dan prasangka etnis yang muncul karena berbagai kebijakan diskriminatif maupun watak pembangunan berorientasi pertumbuhan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi. Etnis Tionghoa adalah salah satu korban kebijakan diskriminatif tersebut. Orde baru menganut kebijakan asimilasi yang mengharuskan etnis Tionghoa melebur dalam budaya pribumi Indonesia. Orde baru menguatkan diskursus terkenal “pri-non pri” yang banyak merugikan kalangan Tionghoa. Pada 1968, berbagai ekspresi kebudayaan Tionghoa dilarang. Pemerintah juga melarang mereka untuk aktif dalam kegiatan politik, menjadi pegawai negeri, dan anggota militer. Pada tahun 1979, pemerintah mewajibkan semua orang Tionghoa untuk melakukan pendaftaran ulang terhadap status kewarganegaraan mereka. Dalam kartu tanda penduduk mereka dicantumkan tanda khusus yang menerangkan bahwa mereka adalah warga Tionghoa¹⁸. Akan tetapi, di balik semua praktik diskriminasi ini, warga Tionghoa tetap menjadi kelompok yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Politik diskriminasi yang membuat mereka tidak bisa berbaur secara leluasa dengan kalangan “pribumi” memicu berbagai prasangka. Inilah yang membuat kerusuhan anti-Tionghoa berkali-kali meletup di Indonesia.

Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi juga memantik berbagai prasangka dikalangan etnis “pribumi” sendiri. Sentimen yang lebih besar dibangun di seputar dikotomi Jawa – Non-Jawa. Sentimen ini dibangun di atas dua asumsi. Yang pertama terkait dengan pemusatan pembangunan di Jawa dan marginalisasi daerah-daerah di luar Jawa. Sementara yang kedua terpaut dengan pengutamaan orang Jawa dalam berbagai posisi strategis baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Pemerintah pusat banyak mengirim pejabat-pejabat Jawa untuk menduduki kursi gubernur atau bupati di berbagai daerah di luar Jawa. Selain itu terdapat berbagai potensi laten yang sementara ini muncul dalam bentuk *stereotyping* yang melibatkan warga pendatang yang biasanya lebih makmur melawan pribumi yang biasanya terpinggirkan. Di Kalimantan, misalnya, antara etnis asli Dayak dan pendatang Madura. Di wilayah pertambangan mineral, seperti di Tembagapura,

¹⁸ Bertrand. *OpCit*. Hal 66

Papua, konflik-konflik juga sering berlangsung. Bara perpecahan etnis ini sebenarnya menyebar hampir merata di seluruh penjuru bumi Indonesia. Represi negara yang begitu kuat hanya membuat daya ledaknya semakin bertambah manakala waktunya tiba.

D. RUNTUHNYA NASIONALISME DOKTRINASI DAN BANGKITNYA NASIONALISME KESADARAN PASCA REFORMASI

Negara yang kuat itu pada akhirnya runtuh pula. Adalah krisis finansial yang berkembang menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 1997 yang mendorong robohnya bangunan kokoh yang mulai keropos itu. Dengan runtuhnya rezim, integralisme yang dibangun puluhan tahun juga turut luruh. Alih-alih menjadi negara-bangsa (*nation-state*), Indonesia menunjukkan wajah aslinya hanya sebagai wadah dari bangsa-bangsa yang bernegara (*state-nations*). Unit-unit bangsa dalam beragam bentuk mulai bermunculan menampilkan diri dan saling bersaing satu sama lain. Dimulai dari kerusuhan Mei yang menampilkan wajah bangsa Tionghoa melawan bangsa-bangsa lainnya; pertarungan dalam pemilu dan pemilihan presiden yang menampilkan dua wajah bangsa dominan Islam dan yang disebut nasionalis; konflik-konflik etnis di Sambas, Sampit, Ambon, dan Poso; gerakan separtisme di Papua, Aceh, Riau, dan Maluku; hingga bangkitnya kembali radikalisme Islam di berbagai daerah. Dalam situasi itu, Indonesia nampak hanya sebagai sosok negara yang sangat rapuh. Bangsa-bangsa itu berupaya memperebutkannya, mengaturnya, menguasainya, atau bahkan menghancurkannya.

Pada bulan April hingga Oktober tahun 1999 proses pembentukan negara baru dilangsungkan lewat suatu mekanisme demokratis bernama pemilihan umum. Bangsa-bangsa yang ingin membangun kembali negara Indonesia terrepresentasi melalui sekitar 48 organisasi politik yang bertarung berebut kekuasaan. Mereka kemudian memang bisa membangun sebuah negara baru, namun menjadi Negara yang rapuh. Setelah ekonomi yang porak-poranda, kekuatan militer juga semakin terdegradasi akibat sorotan yang semakin tajam terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM atau peran politik mereka di masa lalu yang berlebihan.

Mereka tidak bisa lagi jadi andalan ketika komunalisme semakin meningkat dan konflik menyebar di berbagai daerah. Di samping itu, birokrasi juga bobrok karena praktik korupsi yang begitu mengakar sehingga kerja-kerja mereka di masyarakat juga menjadi tidak efektif. Negara baru hasil reformasi yang dibentuk melalui berbagai kompromi politik dan dengan wewenang yang semakin terbatas juga sangat lemah. Pemerintahan awal pasca-Reformasi berkali-kali mengalami bongkar pasang personel bahkan dalam waktu tidak sampai tiga tahun dimakzulkan oleh kompromi politik yang membangunnya dulu.

Lemahnya negara disebabkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, dalam menghadapi krisis finansial negara tidak bisa mengelak dari tekanan berbagai institusi keuangan internasional yang membuatnya harus menggantungkan harapan atas bantuan mereka dalam mengatasi krisis. Bantuan lembaga-lembaga tersebut disertai dengan berbagai persyaratan yang membuatnya harus melucuti sebagian kekuasaannya dan bersedia masuk lebih dalam ke kancah arena pasar global. Di dalam kacamata lembaga-lembaga neoliberal seperti IMF, tidak diragukan bahwa ekonomi Asia, termasuk Indonesia, runtuh akibat akutnya inefisiensi dan disfungsi sebagai konsekuensi dari intervensi negara terhadap operasi pasar bebas dan meluasnya kronisme yang menjadi dampaknya. Adalah kesalahan struktural yang inheren dari ekonomi semacam ini, yakni penolakan mereka untuk mengikatkan diri dalam disiplin pasar global, yang membuat harga-harga saham berjatuh¹⁹. Pelaksanaan pasar bebas yang efektif, menurut Gubernur Bank Sentral Amerika, Alan Greenspan mempersyaratkan aturan hukum yang memberi batasan-batasan atas campur tangan negara dan suatu sistem pemerintahan di mana transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik akan memungkinkan harga dan resiko dinilai secara tepat. Camdessus menambahkan bahwa suatu negara tidak bisa mengharapkan berkah dari kapitalisme global namun menolak mengikuti disiplin dan aturannya. Inilah pentingnya membuat kebijakan yang mampu memberikan kepercayaan pasar²⁰.

Pada bulan Oktober 1997 berbagai media mengabarkan momentum penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) antara Indonesia dengan *International*

¹⁹ Robison dan Hadiz. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. New York dan London: Routledge 2004. hal 7

²⁰ *Ibid*

Monetary Fund (IMF). Dalam moment tersebut terdapat adegan managing director IMF Michael Camdessus yang melipat tangan di dada sambil memperhatikan Presiden Soeharto yang menunduk untuk membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. Bagi sebagian kalangan adegan tersebut menjadi perlambang bagi penyerahan kedaulatan RI kepada IMF. Penandatanganan LoI dengan IMF pada perkembangannya kemudian memang mendiktekan secara rinci kebijakan dan reformasi institusional yang harus ditempuh Indonesia. Para konglomerat dan sekutu politik rezim kemudian dipaksa untuk menyerahkan bermilyar dolar dalam rangka menutup hutang perbankan mereka yang sangat besar sementara monopoli dan konsesi yang sangat besar negara diberikan berhubungan dengan pihak swasta oleh negara harus dibatalkan²¹.

Lemahnya negara juga dipicu oleh perasaan umum masyarakat tentang krisis legitimasi rezim otoritarian itu sendiri. Perasaan itu diluapkan melalui berbagai gerakan masyarakat sipil yang semakin membesar di penghujung kekuasaan orde baru. Krisis finansial sejatinya hanyalah momentum yang baik bagi kalangan masyarakat sipil yang selama bertahun-tahun sebelumnya telah mulai membangun kekuatan untuk mendorong rezim ke dinding keruntuhan. Isu yang senantiasa ditiupkan dan dijadikan diskursus dalam rangka mendelegitimasi rezim adalah tuntutan demokratisasi dan istilah yang sangat populer pada akhir 1990-an, KKN (akronim untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Gerakan masyarakat sipil yang sangat kritis terutama dikendalikan oleh gerakan mahasiswa, kalangan Non-Governmental Organization (NGO atau LSM), kaum intelektual, media, dan beberapa ormas. Semenjak pertengahan 1990-an, gerakan masyarakat sipil ini semakin kritis dan nyaris solid karena telah mampu mengidentifikasi musuh bersama, negara orde baru. Gerakan masyarakat sipil ini selanjutnya berkembang menjadi aksi *people's power*. Mereka berhasil menduduki gedung parlemen di Senayan dan memaksa pimpinannya yang selama ini terhitung orang dekat Presiden untuk menjadi bagian dari gerakan reformasi politik yang mereka perjuangkan.

Setelah orde baru tutup usia, terjadi berbagai reformasi politik sebagai bagian dari proses demokratisasi. Salah satu agenda utama reformasi adalah

²¹ *Ibid.* Hal 8

amandemen Konstitusi UUD 1945. Pada bulan Oktober 1999, MPR hasil pemilu segera menggelar rapat-rapat amandemen UUD 1945 yang pertama. Hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali proses perubahan. Salah satu perubahan fundamental dalam amandemen tersebut adalah distribusi kekuasaan Negara secara lebih merata. Untuk pertama kalinya semenjak demokrasi parlementer dilikuidasi, parlemen diberi kewenangan yang cukup besar. Sejumlah lembaga negara baru dibentuk seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Wacana tentang *power sharing* dan *checks and balances* mulai akrab di telinga publik Indonesia. Di dalam amandemen tersebut juga diatur distribusi kekuasaan di tingkat daerah. Otonomi daerah untuk pertama kalinya juga diatur dalam konstitusi. Sejumlah pasal tentang Hak Asasi Manusia juga mendapatkan porsi sendiri dalam Konstitusi baru (Forum Konstitusi, 2008). Di samping itu, tuntutan terhadap reformasi di tubuh militer semakin digulirkan. Doktrin dwifungsi ABRI dihapuskan dan peran politik militer dibatasi. Tentara dibedakan dari kepolisian sehingga praktis militer tidak lagi menjadi kekuatan pengendali keamanan dalam negeri, namun hanya menjalankan fungsi pertahanan. Perubahan perangkat kelembagaan tersebut telah mengakhiri otoritarianisme secara sempurna.

Lalu bagaimana wacana nasionalisme pasca rezim otoriter berlangsung? Seiring dengan peningkatan demokrasi substansial setelah reformasi '98, nasionalisme juga tidak lagi menjadi dominasi Negara. Pemerintah sudah mulai merubah penanaman wacana nasionalisme tidak lagi berupa doktrinasi, melainkan kesadaran yang terlahir dari diskursus wacana yang ada di tengah masyarakat.

Nasionalisme adalah sesuatu yang dinamis, di mana nasionalisme sangat berkaitan erat dengan kondisi. Masyarakat yang merasakan ketidakadilan akan serta merta tergerus jiwa kebangsaan. Erlangga Masdiana menuliskan nasionalisme perlu terus dirawat dengan memberikan makna. Jika dahulu nasionalisme berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong kemerdekaan, maka saat ini harus dapat menjadi semangat untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta memupuk solidaritas dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

²² Masdiana dkk, Erlangga. *Peran Generasi Muda Dalam Ketahanan Nasional*, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Jakarta, 2008. hal 117

Menurut Panglima TNI, Djoko Santoso, nasionalisme pada dasarnya adalah konsep yang bersifat kontemporer dan dinamis. Nasionalisme Indonesia dibentuk untuk mencapai tujuan dan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan selanjutnya, semangat nasionalisme itu menjadi salah satu nilai yang melandasi terbentuknya wawasan atau cara pandang suatu bangsa, tentang diri dan lingkungannya. Wawasan ini disebut juga sebagai wawasan nusantara.²³

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstalasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.²⁴

Ada enam konsep dasar yang menjadi *building blocks* wawasan nasional Indonesia. *Pertama*, konsep Bhineka Tunggal Ika. *Kedua*, konsep persatuan dan kesatuan. *Ketiga*, konsep kebangsaan/nasionalisme. *Keempat*, konsep tanah air (geopolitik). *Kelima*, konsep negara-bangsa (pancasila). Dan *keenam*, konsep negara kepulauan.²⁵

Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri khas itulah yang membentuk identitas, jati diri dan kepribadian suatu bangsa yang menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Semangat kebangsaan mewujud di atas landasan rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Semangat kebangsaan, akan melahirkan "loyalitas nasional", yakni loyalitas kepada bangsa dan negara. Loyalitas yang paling luhur dan mulia, mengatasi segala kepentingan sosial dan primordial di bawahnya.²⁶

Terhusus untuk pemuda, nasionalisme berkaitan erat dengan konsep ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah aspek dinamis suatu bangsa,

²³ Susanto, Djoko. *Meningkatkan Nasionalisme Pemuda dalam Perspektif Sistem Pertahanan Semesta*. Dalam Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa. Jakarta, Kemenegpora RI 2009. hal 48

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

²⁶ *Ibid*. Hal 49

meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.²⁷ Ketahanan nasional adalah konsep untuk menjamin eksistensi bangsa dan Negara serta prasyarat bagi penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Untuk itu perlu dimiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional guna mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.

Pembinaan ketahanan nasional dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat (termasuk pemuda di dalamnya) dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, dan keselarasan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bersama yang berkeadilan.

Adhyaksa Dault dalam bukunya *Islam dan Nasionalisme* menuliskan bahwa dalam konteks Indonesia yang mayoritas Negara Muslim, sudah banyak diskursus nasionalisme yang mengaitkan antara Islam dan Nasionalisme. Baik yang mencoba mencari hubungan maupun menentangkannya. Adhyaksa menganggap bahwa definisi nasionalisme menurut Hasan Al Banna adalah definisi yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Yaitu nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah airnya (nasionalisme kerinduan), atau keharusan berjuang membebaskan tanah air dari imperialisme (nasionalisme kehormatan dan kebebasan), atau memperkuat ikatan antarmasyarakatnya (nasionalisme kemasyarakatan), atau membebaskan negeri-negeri lain (nasionalisme pembebasan), maka hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah dan dapat diterima bahkan ada yang dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya apabila nasionalisme itu adalah dimaksudkan untuk memilah umat untuk menjadi kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi berseteru satu sama lain, kemudian umat dieksploitasi untuk memenuhi ambisi pribadi (nasionalisme kepartaian), maka itu adalah nasionalisme palsu yang tidak akan memberikan manfaat sedikitpun.²⁸

Pemerintah saat inipun juga tidak mau mengulangi kesalahan pemerintahan orde baru, yaitu dengan metode nasionalisme doktrinasi. Jalaludin Rakhmat

²⁷ Usman, Wan. *Daya Tahan Bangsa*. Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional UI. Jakarta, 2003. hal 4-5

²⁸ Dault, Adhyaksa. *Islam dan Nasionalisme, Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005. hal xvii

mengatakan bahwa nasionalisme sudah gagal dalam menumbuhkan semangat untuk membela Negara. Seperti diketahui, nasionalisme muncul sebagai antitesis terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kapan saja kolonialisme datang maka nasionalisme akan muncul.

Seperti yang disampaikan oleh DR. Budi Setiawan berikut:

*“Konsepsi Indonesia tidak lepas bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan Republik Indonesia, satu kesatuan utuh dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote. Para pemuda harus dibangun dengan memahami itu melalui konteks pemuda Indonesia, satu bangsa satu bahasa, satu kesatuan. Dengan dua pendekatan itu, pemuda diajak mereka sbg bagian identitas negara Indonesia. Jadi, walau pemuda melihat dirinya berasal dari berbagai organisasi yang terdiri dari beragam back ground, tetapi mereka harus sadar mereka berada pada satu rumah yaitu NKRI. Rumah NKRI itu sangat besar ada 33 provinsi, ada keragaman agama, bahasa, suku, itu harus mereka pahami sebagai tempat mereka beramal, untuk mereka melakukan kegiatan. Mereka harus memahami bahwa NKRI sebagai suatu ruang bersama, ada keluarga, halaman, dimana mereka dapat keluar dari kamar mereka masing-masing dan suatu saat bertemu berdiskusi dan membaguskan rumah ini, apakah memotong rumput bersama, mengecat bersama, atau memasak bersama, sehingga itu akan tercium terlihat oleh tetangga-tetangganya dan keharuman bangsa ini. Tapi kalau mereka hanya berkutat di kamar mereka saja, tidak peduli, bahkan saling menjelekan, maka itu yang menimbulkan kehancuran pada rumah mereka sendiri. Dengan konsep itulah nasionalisme dibangun, bukan dengan touch down atau doktrin, Jadi, Nasionalisme harus yang interaktif dan mereka memahami dan ada arahan atau rambu-rambu”.*²⁹

Tetapi ketika sekarang kolonialisme datang dalam bentuk yang sangat samar, tidak lagi dalam bentuk kolonialisme yang kita kenal dahulu, yakni pencaplokan Negara sebagai koloni, tetapi dalam bentuk imperialisme ekonomi, imperialisme budaya, nasionalisme nampaknya menjadi gagap. Perkembangan nasionalisme dari waktu ke waktu juga mengalami kekaburan.³⁰

Apalagi isu keagamaan juga turut menggerogoti nasionalisme dengan ide transnasionalisme agama. Gerakan-gerakan agama yang lintas Negara tumbuh subur dimana-mana. Banyak anak-anak muda yang tertarik dan turut dalam gerakan-gerakan ini. Keadaan ini dipicu oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh Negara adil kuasa dan sekutunya dalam memojokkan Negara-negara muslim.

²⁹ Wawancara dengan DR. Budi Setiawan

³⁰ Rakhmat, Jalaludin, *Tentang Agama Madani*, Reform Review, Vol.1 No.1 April-Juni 2007

Di dalam negeri, nasionalisme juga menghadapi ancaman dengan munculnya ethno nasionalisme. Munculnya semangat memisahkan diri oleh sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu adalah bukti masih adanya ethno nasionalisme di bumi ini. Hal ini dipicu oleh belum merata dan belum adilnya kue pembangunan. Banyak daerah-daerah dengan sumber kekayaan alam melimpah tetapi masyarakatnya banyak yang hidup miskin. Untunglah dengan adanya otonomi daerah lewat pemberian otoritas pengelolaan pemerintah dan pengelolaan anggaran telah meredam laju ethno-nasionalisme. Yang masih kuat melakukan gerakan separatis adalah daerah-daerah yang memiliki akar sejarah pemisahan dari republik.

Sinyalemen mulai menurunnya rasa nasionalisme sudah lama terdengar. Menurut mantan Wakil Perdana Menteri I RI tahun 1957-1959, Mr. Hardi, “Mahasiswa sekarang hanya mengharapkan lekas menjadi sarjana, kemudian mendapatkan pekerjaan dan pangkat disertai gaji yang tinggi. Mereka mendambakan agar dapat menikmati kehidupan yang mewah.” Sehingga dia berkesimpulan bahwa kadar nasionalisme pada tahun 1980-an ini menurun jika dibandingkan dengan nasionalisme yang menyala-nyala di dalam dada para pejuang angkatan 45.³¹

Menurunnya kadar nasionalisme disebabkan oleh, *pertama*, pengaruh dari corak masyarakat yang bersifat kapitalis liberal. Dengan semboyan “*Laisser faire laisser passer*” (merdeka berbuat dan merdeka berjalan) maka corak masyarakat liberalis kapitalis dengan sendirinya menyebabkan timbulnya watak individualis. *Kedua*, timbulnya interpretasi baru terhadap paham kebangsaan itu sendiri. Dimana nasionalisme dianggap telah usang. Karena dianggap sebagai paham yang chauvanis, sempit, anti asing, dan anti modal asing. Terlebih dengan adanya globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas antar Negara.³²

Bahkan Radhar Panca Dahana (2007) menyatakan bahwa gejala belakangan ini, etos kerja pemuda yang semula volunteer (sukarelawan), terutama dalam akal-akal yang bersifat idealistis atau sosial, mulai bergeser menjadi *paid* (bayaran).³³

³¹ Hardi. *Api Nasionalisme, Cuplikan Pengalaman*, Jakarta: Gunung Agung, 1983

³² *Ibid*

³³ Dahana, Radhar Panca. *Mencari Cahaya di Remang Pemuda*, Jurnal Pemuda dan Olahraga, Juli-Agustus 2007

Memang ditengah-tengah derasnya arus globalisasi di mana dunia menjadi datar dan tanpa batas telah mebuat saling ketergantungan antar Negara. Tidak ada satu pun Negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa kerja sama dengan Negara lain. Jangankan persoalan sumber daya alam, bidang ketenagakerjaan pun sudah sangat terbuka dimana pekerja asing dengan mudah bekerja di Negara kita dan pekerja dibutuhkan oleh Negara lain.

Multinational Corporation (MNC) bahkan melewati batas-batas Negara. Sebuah perusahaan MNC dapat memiliki kantor pusat di Tokyo Jepang dan memiliki banyak kantor cabang di kota-kota besar di seluruh dunia. Mereka menguasai kapital di hampir banyak Negara. Pergerakan modal pun dapat melintas batas dengan cepat dalam hitungan detik lewat pasar saham dunia.

Dengan keadaan seperti ini rasa kebangsaan memang mengalami tantangan. Usulan paham internasionalisme untuk menggantikan nasionalisme sempat muncul. Dimana internasionalisme menjadi dasar bagi kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara besar yang sanggup memberikan bantuan ekonomi dan memberikan pinjaman modal.

Proyek identitas lama yang berbasis pada primordialitas etnis dan agama juga masih terus berlangsung dalam nasionalisme pasca rezim otoriter. Kekuatan Islam semakin menampakkan diri. Kampanye islamisasi semakin marak dengan hadirnya sejumlah organisasi Islam secara ekspresif. Setelah gagal di pusat, mereka memulai suatu strategi “bottom-up” untuk membangun suatu Negara berjubah agama dengan menyusunnya dari pinggiran. Proyek terkenal mereka adalah perda syariat Islam di berbagai daerah.³⁴ Kelompok minoritas juga mulai membangun suatu strategi identitas baru. Mereka tidak (lagi) membangun aliansi dengan negara seperti dilakukan sepanjang orde baru, namun mendirikan sejumlah organisasi dan membangun aliansi dengan kelompok-kelompok mayoritas. Bagaimanapun, yang menarik di antara semuanya adalah kehadiran nasionalisme sebagai suatu diskursus baru yang bersifat “inklusif” dan “demokratis.” Inklusif dalam pengertian bahwa ia tidak terikat pada isu-isu tertentu seperti konflik etnik atau agama, namun juga dengan persoalan-persoalan

³⁴ Zada, Khamami. *Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung*. Jurnal Tashwirul Afkar. Ed. No. 20 Tahun 2006. Hal 8-20

struktural seperti negara yang terlalu pro pasar, persoalan kultural seperti korupsi, atau persoalan moralitas seperti debat RUU Pornografi.

Berkaitan dengan perdebatan RUU Pornografi, pemerintah bersikap:

“Pemerintah sebenarnya pada jiwa dibuatnya UU ini untuk apa, yaitu untuk laju anak bangsa di masa depan, dengan teguran informasi yang ada di media di masyarakat sehingga UU ini dilahirkan, bersama rakyat diwakili di parlemen. Jadi yang didukung ada pada itu, bahwa bangsa ini harus diselamatkan dari hal yang destruktif. Saya pikir semua orang setuju itu, baik yang di Papua dan Bali. Tinggal mungkin proses berpikir dan pendekatan ketika dihadapkan praktek di lapangan. Kita lebih dari lukisan, patung-patung di Bali. Tapi tujuannya sama, yaitu ingin anak bangsa ini tidak hancur hanya karena demoralisasi atau hal-hal destruktif.”³⁵

Diskursus nasionalisme memang menjadi perhatian oleh pemerintah. Khusus di kalangan pemuda, pemerintah melihat bahwa peran serta kaum muda yang berkualitas sebagai *“potential leader”* di masa depan akan sangat penting khususnya sebagai *“driving force”* pembangunan nasional. Muladi menyampaikan bahwa kaitan antara pemahaman nasionalisme dalam idiom bangsa dan Negara Indonesia, keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan sebenarnya terkait dengan doktrin ketahanan nasional yang seringkali juga disebut sebagai geostrategik Indonesia yang berorientasi pada konsep pendekatan system, dimana baik determinan natural dan determinan sosial terikat dengan norma-norma dan nilai-nilai kesisteman berupa *“purposive behavior, wholism, interrelatedness, openness, value transformation, control mechanism”*.³⁶

Penekanan diberikan oleh Adhyaksa Dault dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme di kalangan pemuda, menurutnya nasionalisme yang selama ini dikembangkan adalah nasionalisme formal, hingga muncullah istilah nasionalis sertifikat: sertifikat penataran P4.

“Begitu dapat sertifikat merasa sudah nasionalis. Nasionalisme yang kita kembangkan adalah nasionalisme populer. Nasionalisme yang berasal dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.”³⁷

³⁵ Wawancara dengan DR. Budi Setiawan

³⁶ Muladi. Dalam *Dialog Pemuda Dalam Membangun Bangsa, 80 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Kemenegpora RI, 2009. hal 91

³⁷ Wawancara La Tofi dan Faisal Bintang dengan Adhaksa Dault, dalam *Biografi Politik*. Jakarta: La Tofi Enterprise, 2008. hal 38

Berkaitan dengan konsep Negara-bangsa yang dikembangkan oleh pemerintah. Adhyaksa menuliskan bahwa Negara-bangsa adalah suatu gagasan tentang Negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan umum.³⁸

Menurut pemerintah, Indonesia harus mempertahankan empat konsensus dasar pembentukan negara-bangsa Indonesia, yaitu: UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dan Nasionalisme harus diwujudkan sebagai *civic nationalism*, bukannya *romantic nationalism*. *Civic nationalism* adalah paham dan semangat kebangsaan dan bernegara yang lahir dari kesadaran dan kephahaman akan tujuan dan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Bukan nasionalisme yang dibangun dari nilai-nilai romantisme, yaitu nasionalisme yang bersifat emosional, primordial, dan simbolik.³⁹

E. KONTESTASI DISKURSUS NASIONALISME DARI OKP

Mengacu kepada Calhoun (2007), studi ini menapaki sebuah fase ketika nasionalisme masih bekerja sebagai sebuah diskursus, sebelum ia muncul sebagai sesuatu sosok yang obyektif. Penting untuk memperjelas persoalan ini. Sebagai sebuah formasi diskursif, nasionalisme pasca reformasi menghadirkan corak baru yang berbeda dari nasionalisme negara. Bahkan, ia menggesernya sama sekali. Perbincangan tentang nasionalisme Indonesia dikembalikan kepada formasi diskursif yang terbangun di awal abad XX ketika sesuatu yang kelak bernama Indonesia masih terserak dalam pikiran-pikiran Tjipto Mangonkoesoemo saat rapat-rapat Boedi Oetomo, dalam tulisan-tulisan Abdul Rivai di majalah triwulan *Bintang Hindia*, atau dalam baris-baris surat kabar *Sin Po*. Suatu masa ketika ide tentang Indonesia belum mewujud dalam sebuah sosok bangsa bahkan Negara-bangsa yang obyektif seperti dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta. Bedanya, studi ini dilakukan dalam kerangka formasi obyektif bangsa Indonesia telah

³⁸ Adhyaksa Dault, dalam keynote Speaker Peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda

³⁹ Susanto, Djoko. *Op.Cit.* Pernyataan tersebut juga disampaikan dengan redaksi yang berbeda oleh Adhyaksa Dault, Hidayat Nur Wahid, dan Muladi dalam Dialog Pemuda Dalam Membangun Bangsa, Jakarta 2009

terbangun dan hidup selama lebih dari setengah abad. Jika diskursus nasionalisme abad XX sebagian besar dikonstruksi sebagai perlawanan terhadap sejarah kolonialisme, maka diskursus nasionalisme yang dikemukakan dalam studi ini lebih banyak dikendalikan sebagai reaksi terhadap sejarah otoritarianisme negara-bangsa yang obyektif.

E.1. Gagasan OKP Terhadap Indonesia

Krisis di berbagai bidang telah menyita energi dan kepercayaan diri pemimpin dan rakyat yang dapat mengarah pada kemunduran. Dibutuhkan keberanian berlebihan dan upaya menghitung kembali kekuatan untuk bangkit. Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan sejarah panjang memperjuangkan, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Inilah bangsa yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaannya dari awal. Menurut beberapa pengamat, hanya Indonesia dan Vietnam yang di Asia Tenggara yang merebut kemerdekaannya dengan sempurna dari penjajah, bukan hadiah ataupun konsensus. Kemerdekaan yang sempurna inilah yang harus terus dikobarkan dan diwariskan pada setiap generasi bangsa.

Menurut Gema Pembebasan dan HTI, Indonesia merupakan warisan Islam. Secara historis, Indonesia sebagai bangsa adalah sebuah paradoks di satu sisi dan berkah di sisi lain. Menjadi paradoks karena sebagai bangsa merupakan warisan penjajahan Eropa dan, dengan demikian, menyerap produk budaya dan menerapkan aturan hukum mereka. Ikatan mereka yang disebut bangsa Indonesia kepada Indonesia sebenarnya hanya kepada tanah dan, dalam batas tertentu, budaya lokal mereka. Dalam perspektif HTI, Eropa adalah representasi dari bangsa kafir yang budayanya tidak seharusnya bercokol di Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia adalah berkah yang diberikan oleh Islam. Ismail mengutarakan bahwa perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam mampu membebaskan Tanah Hindia Timur dari penjajahan bangsa-bangsa kafir. Perlawanan umat Islam terhadap hegemoni bangsa asing tersebut pada dasarnya tidak lahir dari spirit nasionalisme, namun dari tuntutan agama yang mewajibkan seseorang membela tanah airnya.⁴⁰

Ismail menyontohkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar NU, Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari saat revolusi fisik berlangsung pada tahun

⁴⁰ Wawancara dengan Ismail Yusanto

1945. Resolusi itu, menurutnya, tidak muncul dari spirit nasionalisme, namun lahir dari spirit keislaman. Hal yang sama juga melingkupi para aktivis gerakan nasional dari kalangan Islam seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim. Bagi mereka, menjadi pejuang kemerdekaan lebih merupakan kewajiban religius daripada tuntutan spirit kebangsaan itu sendiri. Hal terbukti dari bagaimana mereka mengaktualisasikan rasa kebangsaan tersebut. Kedua tokoh tersebut memperjuangkan kemerdekaan bangsa mereka lewat suatu organisasi yang bernama Sarekat Islam (SI) dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Agus Salim bahkan mendidik para pemuda muslim yang kelak menjadi aktivis pergerakan nasional dalam organisasi pemuda bernama Jong Islamieten Bond (JIB). Sebagai organisasi berideologi Islam, memori HTI tentang tahap-tahap pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak bisa lepas dari ingatan tentang peran historis dan simbolik Islam. Bagi HTI, Islam adalah identitas utama yang membentuk Indonesia dan menyatukan warga Nusantara. Orang pribumi di masa lalu akrab dengan sebutan ‘orang selam’, mengacu pada Islam. Apalagi, bahasa Melayu yang menjadi *lingua franca* bagi penduduk Nusantara banyak dipengaruhi oleh peradaban Arab Muslim. Bahasa Melayu itulah yang kemudian ditransformasikan sebagai bahasa nasional Indonesia yang dikenal sekarang ini.

Menurut Ismail, peran historis Islam ini terus berkembang dan semakin menentukan dalam perjuangan politik kemerdekaan Indonesia modern. Lebih lanjut Ismail berpendapat bahwa gerakan kebangsaan Indonesia modern sejatinya lebih dipelopori oleh Sarekat Islam daripada Budi Utomo seperti yang dibakukan selama ini. Ismail berpendapat:

“Ayo buka sejarah; siapa yang berjuang untuk negeri ini sampai rela mati; orang Islam atau Kristen? Sebab mana ada orang Kristen yang mau melawan Belanda, wong agamanya sama. Para pejuang dulu, mulai Diponegoro, Imam Bonjol hingga momentum kebangkitan nasional itu (dipelopori oleh) Cokroaminoto dan Sarekat Islam. (Sementara) Budi Utomo itu rasis, Jawa banget. Itu lahir karena konflik kelas priyayi dan Non priyayi.”⁴¹

Menurutnya, perjuangan para tokoh Islam tersebut untuk kemerdekaan memiliki landasan yang kokoh dalam doktrin keislaman sendiri. Dasar keislaman dari perjuangan mereka adalah sebagai berikut:

⁴¹ Wawancara dengan Ismail Yusanto

“Itu nasionalisme yang dimaknai oleh Tjokroaminoto yaitu pembelaan terhadap negeri ini melawan penjajah. Dasarnya adalah perintah agama. Jelas sekali; man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Harta maksudnya adalah negerinya, tanahnya, dan lain-lain. Dan itu adalah jihad. Apalagai kalau jelas-jelas menjajah. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta’tadu. Belanda datang ke sini memerangi kita kan, karena itu; lawan!”⁴²

Imaji tentang Islam sebagai pembentuk identitas Indonesia ini memang direpresentasikan melalui penolakannya terhadap arus sejarah dominan. Menurut Ismail, sejarah Indonesia diwarnai oleh kebohongan dan pembodohan. Sejarawan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kalangan orientalis Barat dalam memproduksi tulisan-tulisan mereka tentang Indonesia. Selain itu, negara yang mewarisi sistem Eropa tersebut juga secara politis secara sengaja menghilangkan ingatan tentang peran umat Islam dalam sejarah. Figur-figur dan momentum-momentum bersejarah dalam pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa secara sistematis dihilangkan dari citra Islam. Selain ‘pemutarbalikan fakta’ terkait organisasi pelopor kebangkitan nasional dari SI ke BU, Ismail juga mengemukakan contoh tentang pelabelan bapak pendidikan nasional yang dipegang oleh pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro. Ismail mengungkapkan:

“Bahkan sampai perhatian pada pendidikan itu sebenarnya K.H. Ahmad Dahlan. Dia mendirikan sekolah pada tahun 1911. Sebelas tahun kemudian Ki Hadjar Dewantoro mendirikan Taman Siswa. Saya murid SD Taman Siswa. Dia (mendirikan Taman Siswa) setelah belajar dari Ahmad Dahlan. Dia datang ke Kauman melihat sekolahnya Ahmad Dahlan. Jadi, siapa yang bapak pendidikan nasional itu? Siapa yang duluan? Siapa yang memberi inspirasi dan siapa yang terinspirasi? Masak bapak pendidikan nasional terinspirasi oleh orang lain. Kan mestinya itu yang jadi bapak, ini yang jadi anak.”⁴³

Bagi HTI, spirit Islam merupakan inspirasi awal yang melahirkan para tokoh pergerakan nasional mulai yang beraliran nasionalis hingga komunis. Menurutnya, figur-figur seperti Soekarno dan Hatta adalah figur-figur yang memiliki latar belakang pengaruh keislaman yang cukup kuat. Soekarno dididik secara langsung, tinggal secepat, dan banyak mendapatkan wawasan dari Tjokroaminoto. Ia bahkan sempat menjadi menantu Tjokroaminoto. Demikian halnya Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden ini adalah keturunan dari ulama terkemuka di Sumatera Barat. Setelah pensiun ia bahkan sempat menyponsori

⁴² Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁴³ Wawancara dengan Ismail Yusanto

pendirian sebuah partai Islam, yakni Partai Umat Islam. Hal yang sama juga terjadi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini dilahirkan oleh para aktivis Sarekat Islam (SI) dan, dengan demikian, memiliki visi keislaman tertentu. Ia melihat bahwa komunisme awal sejatinya adalah suatu ekspresi pemikiran sosial kemasyarakatan, bukan ideologi atau teologi. Komunisme sendiri tidak jauh berbeda dengan sosialisme, nasionalisme, atau kapitalisme. Menurutnya, perlu dibedakan antara pemikiran sosial kemasyarakatan dengan teologi. Para aktivis komunis seperti Tan Malaka dan DN Aidit, menurutnya, secara teologis adalah Muslim dan, dalam batas-batas tertentu, memiliki cara mengungkapkan ekspresi keislaman mereka. Pandangan HTI tentang komunisme ini menarik mengingat antagonisme yang begitu tinggi di kalangan para politisi Islam di Indonesia. Para politisi Islam pada umumnya menganggap bahwa komunisme identik dengan ateisme dan anti agama. Dalam kaitan itu Ismail menguraikan:

“Itu kalau saya lihat pada pemikiran sosial kemasyarakatan, bukan pada teologinya. Orang seperti Tan Malaka secara teologis Muslim, tapi secara sosial kemasyarakatan dia komunis. Ideologinya lah. Itu adalah sebuah proses yang belum selesai. Itu bukan gejala yang aneh karena sekarang pun terjadi. Misalnya, anak-anak muda aktivis organisasi islam di kampus itu. Dia tetap solat, tahajud, puasa, tapi pikirannya komunis. Bukan komunis dalam arti teologi tapi ideologi. DN Aidit itu pribadi yang masih nampak keislamannya, dia masih ingat Tuhan. Islamnya masih ada.”⁴⁴

HTI melihat warna sejarah Indonesia adalah Islam dalam hampir semua hal. Namun, menurut Ismail, terdapat upaya sistematis untuk menggiring arah sejarah Indonesia ke arus sekular. Ia mempersamakan fenomena ini dengan apa yang terjadi dengan keruntuhan khilafah di Turki pada tahun 1924. Menurutnya, Khilafah Islamiyah di Turki runtuh atas upaya bangsa-bangsa Barat. Ia menyebut Mustafa Kemal Attaturk, bapak pendiri negara Turki modern, sebagai agen Inggris. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Kaum orientalis Belanda, menurut Ismail, telah lama menginginkan suatu akulturasi antara budaya Barat dan Hindia. Hal itu diharapkan akan memperkuat loyalitas pribumi terhadap Ratu Belanda dan dengan cara akulturasi itulah Belanda dapat meredam potensi

⁴⁴ Wawancara dengan Ismail Yusanto

perlawanan dalam diri Islam. Strategi itu tidak sepenuhnya gagal dan juga tidak sepenuhnya berhasil.⁴⁵

Secara politik, taktik orientalis itu justru menjadi bumerang. Akulturasi membuat kaum pribumi mudah masuk ke dalam akses-akses vital dari politik dan kebudayaan Belanda. Hal itu membuat mereka lebih memahami penjajahan dari sisi para penjajahnya sendiri. Sementara di sisi kebudayaan, taktik kaum orientalis tersebut menjadi sangat berhasil. Mereka mampu membuat kaum pribumi 'kagum' terhadap keluhuran budaya Barat dan ilmu pengetahuan yang dibawanya. Mereka menganggap bahwa untuk menjadi bangsa yang besar semestinya meniru bangsa Barat dan mewarisi tradisi pengetahuannya. Mereka mempelajari filsafat Yunani, namun tidak dibuat untuk tahu bahwa yang mengembangkan filsafat Yunani tersebut dan memperkenalkannya kembali ke dunia Barat adalah para filsuf Muslim di Timur Tengah di saat Barat sedang dirundung kabut Abad Kegelapan. Para orientalis Barat tersebut telah berhasil melahirkan para sekularis Muslim seperti Achmad dan Hussein Djajadiningrat dari Banten hingga Tan Malaka dari Sumatera Barat.

Ketika diminta pandangannya secara khusus tentang Indonesia, Indonesia yang besar adalah Indonesia di mana kelompok mayoritas menghargai dan negara melindungi hak-hak minoritas. Dalam kaitan ini Jamil berbicara tentang visi GP tentang pluralisme. Konsep GP tentang pluralisme tentu berbeda dengan kelompok moderat semacam Wahid Institute. Pluralisme dalam versi GP adalah politik mengelola sebuah masyarakat yang beragam, bukan bagaimana keragaman menjadi suatu prinsip hidup. Menurut GP, khilafah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, namun juga umat non-Muslim. Alasan klasiknya tentu saja karena Islam adalah ajaran yang memiliki dimensi universal. Namun, lebih teknisnya adalah alasan teologis bahwa sumber-sumber hukum Islam seperti Qur'an dan Sunnah telah memiliki konsep-konsep seperti *kafir dzimmi*. Juga apologi historis bahwa di berbagai tempat di mana umat Islam menjadi kelompok dominan, kelompok-kelompok minoritas selalu berkembang dengan baik tanpa diskriminasi.⁴⁶

Sejalan dengan Jamil, Ismail mengungkapkan,

⁴⁵ Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁴⁶ Wawancara dengan Muthohar Jamil

*“Non-muslim itu juga mendapatkan kebaikan dari Islam. Kalau sejarah jujur tidak perlu takut. Gimana suku Koptik yang Nasrani 400 tahun di Mesir di bawah Islam melahirkan Boutros Boutros Gali, lebih 400 tahun orang Kristen di Irak di bawah Islam melahirkan Tareq Aziz, Spanyol 700 tahun di bawah Islam hingga disebut *espagnole et religion*. Kalau Islam tidak mampu mengatur masyarakat plural, sudah habis suku Koptik di Mesir.”⁴⁷*

Demi memperkuat argumentasinya tersebut, Ismail lantas memperbandingkan dengan situasi sebaliknya di mana komunitas Islam menjadi minoritas di sejumlah negara mayoritas non-Muslim. Ia mengatakan, Coba lihat orang Islam di Thailand dan Filipina. Sengsara. Filipina sejak merdeka yang jadi senator orang Islam baru lima. Padahal jumlah mereka 25%. Jangan harap jadi menteri, panglima, gubernur bank sentral. Coba lihat di Indonesia. *Let's say* non-Muslim 10%, tapi lihat berapa kali mereka menjabat gubernur bank sentral, menteri, pejabat presiden, panglima tentara. Ini kita tidak bicara sara, tapi fakta. Bahwa orang Islam itu mengerti bagaimana memperlakukan orang-orang non-Muslim.⁴⁸

Untuk Indonesia, KAMMI menawarkan konsepsi Muslim Negarawan yang merupakan hasil lokakarya kaderisasi di tahun 2005. konsepsi Muslim Negarawan ini merupakan interpretasi dari sosok ‘Pemimpin Masa Depan yang Tangguh’ sebagaimana termaktub dalam Visi KAMMI.⁴⁹

Pilihan KAMMI terletak pada kata negarawan bukan tanpa sebab. Perbedaan mendasar antara politisi dan negarawan terletak pada peran-peran perubahannya. Hal yang cukup kentara dari keduanya dibedakan oleh Nurcholis Madjid, politisi lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya, sedangkan negarawan disibukkan bekerja untuk kepentingan bangsa dan generasi masa depannya. Di pengertian ini, diharapkan KAMMI dapat melahirkan manusia-manusia yang lebih memikirkan bangsa dan generasi penerusnya di masa depan dari pada kepentingan diri dan kelompoknya.⁵⁰

Jika dilihat dari konteks UUD 1945, maka misi dan peran kenegarawanan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa

⁴⁷ Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁴⁸ Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁴⁹ Imam, Rijalul. *Menyiapkan Momentum, Refleksi Paradigmatik Pemikiran Gerakan Pemuda Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: KAMMI Pusat, 2008. Hal 68

⁵⁰ *Ibid.* Hal 69

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah, kenegarawanan versi KAMMI dijalankan. Namun kenegarawanan yang dimaknai KAMMI tidak dimaknai secara sekuler. Dengan istilah muslim, maka nilai-nilai keislaman mewarnai watak kewarganegaraan kader KAMMI.⁵¹

Adapun bagi KAMMI, Indonesia berangkat dari sejarah keragaman menuju satu kesatuan. *“Indonesia memiliki batas territorial yang begitu luas, bahkan garis pantainya no.2 setelah Kanada. Indonesia adalah Negara karena punya tanah dan rakyat dan rakyatnya punya sejarah. Sejarah Indonesia itu keragaman bersepakat pada suatu dharma yaitu Indonesia.”*⁵²

Dan bagi KAMMI, Indonesia tidak harus berupa negara Islam, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Islam.

*“Sebenarnya yang KAMMI inginkan bukan negaranya, melainkan membentuk masyarakatnya. Apapun bentuk negaranya, masalah yang substansial adalah Individunya yang seperti apa, jadi individu yang islami yaitu individu yang taat terhadap Islam, ada gairah religiusitas, dan juga kami menghormati agama2 lain sesuai dengan keyakinannya masing2, karena itu sudah hak yang dilindungi Negara”.*⁵³

Senada dengan KAMMI, KMHDI melihat bahwa Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan dan pluralitas. Untuk itu, Indonesia sebagai sebuah Negara yang plural dan menghargai kemajemukan adalah konsep Negara yang didamba oleh segenap anggota KMHDI. Untuk itu dalam pokok-pokok pikiran kenegaraan, KMHDI merumuskan dalam tiga hal, yaitu: Negara, Hukum dan Demokrasi.

Konsep Negara sebagai sebuah system pemerintahan terpusat dan dikendalikan hanya oleh lobi-lobi beberapa kelompok elit dalam suatu lingkaran para pengambil keputusan, bagi KMHDI harus dirubah dengan suatu konsep tentang Negara-bangsa yang mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Negara-bangsa ini juga harus mampu mengakomodasi pluralitas yang ada pada masyarakat dan bukan menggunakan

⁵¹ Wawancara dengan Rijalul Imam

⁵² Wawancara dengan Rijalul Imam

⁵³ Wawancara dengan Rijalul Imam

pluralitas tersebut sebagai sebuah senjata potensial untuk memecah belah persatuan.⁵⁴

Ada dua ekstrimitas dalam wacana dan strategi tentang pluralitas; di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang dengan mudah diikat dalam slogan Bhineka Tunggal Ika, di segi lain dipandang sebagai momok yang perlu diatasi dengan berbagai strategi politisasi. Keduanya meletakkan pluralitas sebagai stigma yang harus ditanggulangi. Kegagalan ekstrimitas pertama terjadi setelah agak lama bangsa dan Negara Indonesia hanya mengandalkan pada ideologi dan doktrin dalam mengikat persatuan dan kesatuan NKRI.

Kegagalan ekstrimitas kedua dalam mengatasi pluralitas berasal dari mereka yang berpikir secara strukturalis, bahwa dalam pluralitas yang ada hanyalah pertentangan, sehingga sukar sekali diupayakan integrasi. Pendekatan ini dipergunakan oleh Orde Baru secara efektif, sehingga meredam perbedaan dalam masyarakat plural tersebut tidak menjadi konflik manifes atau tidak meledak ke permukaan.

“Cakupan Indonesia apabila kita memandangnya adalah sebuah bangsa yang terdiri dari beberapa perbedaan yang bisa kita rangkai menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, kita berangkat dari sebuah perbedaan, pluralisme, dengan aneka budaya, suku, agama, dsb yang semua itu kita jadikan kekuatan sebagai dasar kekuatan pembangunan kita. Jadi, berangkat dari sebuah perbedaan.”⁵⁵

Jika pluralitas telah menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (*pluralistic society*), maka kebutuhan yang segera muncul bukan meredam dan menyembunyikan pluralitas yang ada, atau memaksanya agar menyatu. Melainkan memberikan ruang terbuka agar berbagai perbedaan tersebut muncul ke permukaan, berkelindan, dan berdialektika dengan wajar. Dalam ruang terbuka tersebut berbagai perbedaan dihubungkan oleh garis kolinier yang menurut KMHDI disebut demokrasi. Yang merupakan hal kedua dari pokok-pokok kenegaraan.

Dalam konteks GMNI, Indonesia harus berbingkai Pancasila sebagaimana yang diwariskan oleh para *founding fathers* khususnya Bung Karno. Pancasila menurut GMNI merupakan dasar Negara yang tidak bisa tergantikan. Pancasila

⁵⁴ Lihat Penjelasan atas Purwaka AD/ART KMHDI

⁵⁵ Wawancara dengan Wayan Sudane

merupakan hasil pemikiran dari para *founding fathers* yang merumuskan bahwa Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan agama karena terdiri dari beragam agama dan juga harus mengayomi beragam budaya yang ada di dalamnya. Agar dapat memahami dan memaknai Pancasila, maka seluruh kader GMNI wajib membaca antara lain: pidato Bung Karno tentang “Lahirnya Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945, kuliah Pancasila tentang “Pancasila Dasar Negara” yang disampaikan oleh Bung Karno di Istana Negara, dan pidato Bung Karno di depan Sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru”.

Selain Pancasila, kader-kader GMNI juga wajib memahami makna dari Pembukaan UUD 1945. Dimana dari Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat diambil beberapa poin penting antara lain:

1. Pokok perjuangan bangsa Indonesia adalah menghapuskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Perjuangan tersebut sesungguhnya merupakan berkah dari Allah Yang Maha Kuasa
3. Negara berfungsi sebagai:
 - a. ‘Perumahan’ bangsa yang memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - b. Alat perjuangan untuk menuju terciptanya cita-cita nasional, yakni: masyarakat adil dan makmur di tengah dunia tanpa penindasan.

Dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB ke-XV pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila sudah ada dan terkandung dalam bangsa Indonesia sejak berabad-abad. Pancasila tidak berpangkal pada manifesto komunis ataupun *Declaration of Independence*.⁵⁶

E.2. Gagasan OKP Terhadap Nasionalisme

Ketika menjelaskan tentang nilai kedua dari Pancasila, Soekarno menjelaskan tentang nasionalisme yang dimaksud dalam nilai kedua dari Pancasila tersebut. Bahwa nasionalisme yang dimaksud bukanlah chauvinisme. Indonesia tidak menganggap dirinya lebih unggul dari bangsa lain. Dan juga tidak

⁵⁶ Soekarno, *Membangun Dunia Kembali (To Build The World a New)*, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum XV PBB tanggal 30 September 1960.

pula berusaha untuk memaksakan kehendak kepada bangsa-bangsa lain. Soekarno menyebutkan bahwa Negara-negara Barat telah memutarbalikan nasionalisme. Padahal nasionalisme yang sejati masih tetap berkobar di Negara-negara Barat.⁵⁷

Ide ini sejalan dengan chusnul, bahwa nasionalisme yang diusung oleh GMNI bukanlah nasionalisme chauvinis seperti yang ada di Jerman. Bahwa nasionalisme merupakan suatu hal yang bersifat humanis, dan ada banyak versi di berbagai Negara. Untuk di Indonesia, nasionalisme mengedepankan kemanusiaan dan anti penjajahan.⁵⁸

Selain Pancasila dan UUD 1945, GMNI juga mengusung nilai-nilai marhaenisme sebagai asas perjuangan. Dalam membahas Marhaenisme, bisa dikaitkan tentang bagaimana kapitalisme masuk dalam fenomena yang disebut globalisasi.

Kendatipun suatu korporasi dianggap sebagai representasi dari kepentingan ekonomi-politik dari negara-bangsa asalnya, bagaimanapun ia pada dasarnya bekerja lewat sistem kapitalisme. Adam Smith dan Karl Marx sejak awal meyakini bahwa ciri modal yang sangat penting adalah ia bersifat internasional. Menurut Smith, adalah masuk akal jika modal harus dibebaskan dari rintangan politik nasional. Sedangkan bagi Marx, ekspansi pasar secara progresif melalui internasionalisasi modal merupakan keharusan historis dari kapitalisme.⁵⁹ Oleh karena itu, Mark Rupert menyebut globalisasi adalah konsekuensi historis dari perkembangan kapitalisme. Menurutnya, globalisasi adalah representasi dari proses perkembangan yang terus berlanjut dari organisasi produksi kapitalis dan formasi sosial yang diasosiasikan dengannya. Rupert menjelaskan:

*These historical structures—the particular economic, political, and cultural forms with which capitalism is articulated in particular times and places— are sites of social power relations and objects of struggle among social agents positioned within these structures.*⁶⁰

Menurut Manuel Castells (1997), gerakan-gerakan kontemporer yang mengatasnamakan nasionalisme seringkali lahir sebagai reaksi terhadap

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wawancara dengan Khusnul Hidayat

⁵⁹ Barnet, R.J. dan Muller, R.E. *Menjangkau Dunia Menguk Kekuasaan Perusahaan Multinasional*. Jakarta: LP3ES, 1984. Hal 84

⁶⁰ Rupert, Mark. *Ideologies of Globalization: Contending Visions of New World Order*, London: Routledge, 2000. Hal 43

globalisasi, terutama terhadap akibat-akibat ekonomi yang dibawanya. Bagi Castells, nasionalisme baru ini adalah ekspresi dari identitas perlawanan. Castells membedakan identitas perlawanan dari identitas pelegitimasi (*legitimizing identity*) atau identitas proyektif (*project identity*). Jika identitas pelegitimasi menggerakkan masyarakat sipil dan identitas proyektif bertujuan membuat suatu bentuk masyarakat baru, identitas perlawanan digerakkan oleh kelompok-kelompok yang merasa terancam atau termarginalisasi. Nasionalisme adalah ungkapan identitas defensif. Ia merupakan bentuk reaksi perlawanan terhadap kuasa elite global.⁶¹

Menurut GMNI, kelompok-kelompok yang termarginalisasi tersebut merupakan kelompok marhaen. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian awal bab ini, bahwa kaum marhaen adalah kaum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: kaum proletar (buruh), kaum tani melarat, dan kaum melarat lainnya.

Dalam pidato Bung Karno didepan konferensi Partindo di Mataram tahun 1933, marhaenisme yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Pernyataan ini kembali diulang dalam pidato Bung Karno di depan konferensi besar GMNI di Kaliurang 1959, dimana menurut Bung Karno, azas Marhaenisme merupakan azas yang paling cocok untuk gerakan rakyat Indonesia. Rumusannya adalah bahwa marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat yang dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen. Marhaenisme cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum marhaen pada umumnya. Marhaenisme adalah, dus azas dan cara perjuangan “*tegelijk*” menuju kepada hilangnya Kapitalisme, Imperialisme dan Kolonialisme.⁶²

*“Secara positif, maka Marhaenisme saya namakan juga sosio nasionalisme dan sosio demokrasi; karena Nasionalismenya Kaum Marhaen adalah Nasionalisme yang Sosial Bewust, dan karenanya Demokrasinya Kaum Marhaen adalah Demokrasi yang Sosial Bewust-pula.”*⁶³

Jika membaca artikel-artikel yang terdapat dalam situs-situs seputar GMNI, akan nampak bahwa posisi ideologis organisasi ini. Ideologi GMNI adalah ideologi perlawanan. Dalam pengertian dasar GMNI. Disebutkan GMNI sebagai organisasi perjuangan yang terorganisir. Dengan tujuan perjuangannya adalah

⁶¹ Castells, Manuel. *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Publishing. 1997

⁶² www.gmnisurabaya.org/azas-perjuangan-gmni/

⁶³ *Ibid*

mendidik kader bangsa mewujudkan masyarakat Pancasila sesuai dengan amanat UUD 1945 yang sejati. Sebab dalam keyakinan GMNI, hanya dalam masyarakat Pancasila yang sejati, kaum marhaen dapat diselamatkan dari bencana kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan terhindar dari berbagai bentuk penindasan.

Menurut GMNI, aktor-aktor utama neoliberalisme berkepentingan menguasai bahkan memonopoli akses atas sumber daya alam, buruh dan pasar dengan mendorong liberalisasi ekonomi, deregulasi dan privatisasi tidak hanya terhadap aset-aset BUMN, tapi juga privatisasi terhadap sumber-sumber vital kehidupan rakyat, seperti pangan, kesehatan, energi, air, dan sumber daya genetik. Mereka berupaya semaksimal mungkin melakukan pengurangan terhadap peran negara.

Dalam instruksi aksi nasional GMNI terhadap penolakan kenaikan BBM, GMNI bersikap bahwa dengan mengambil langkah liberalisasi energi, pemerintah sama dengan tidak bertanggungjawab terhadap hak pemenuhan atas energi yang murah warganya.⁶⁴

Sikap-sikap kritis GMNI juga nampak dalam rangka peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 23 April 2005. Bersama dengan organ lain – salah satunya adalah WALHI – GMNI membentuk Persatuan Rakyat Anti Imperialisme (PERISAI). Dalam statemen PERISAI yang berjudul “Kolonialisme Belum Mati”, dikemukakan bahwa:

*“Imperialisme di mana-mana ditandai oleh pemusatan kekayaan dan kemakmuran di tangan segelintir orang, dengan merampas dan merampok sumber daya alam dan hak-hak rakyat miskin di pelbagai negeri. Sementara itu, rejim boneka sebagai kaki tangannya, selalu memperlihatkan watak anti rakyat”.*⁶⁵

Begitupun dalam memaknai kata Nasional dalam GMNI, GMNI adalah organisasi yang berlingkup nasional. Artinya bukan organisasi yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, atau golongan yang bersifat terbatas. Makna Nasional juga mengandung pengertian bahwa yang diperjuangkan oleh GMNI adalah kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang berwatak Nasionalis, maka Nasionalisme GMNI jelas adalah Nasionalisme Pancasila. Untuk itu, bagi GMNI, NKRI bersifat harga mati. Sehingga dalam menyikapi globalisasi di abad 21 ini,

⁶⁴ <http://dedyrachmadi.wordpress.com/2008/05/13/instruksi-aksi-nasional>

⁶⁵ www.Walhi.or.id

GMNI menyebut abad 21 sebagai abad tanggung langgang. Yang dimaksud abad tanggung langgang adalah:

“Abad tanggung langgang yang dimaksud adalah perubahan tatanan dunia begitu sangat cepat berderap baik tata politik, ekonomi dan kebudayaan. Semua ternisbikan karenanya jarak, ruang dan waktu menjadi singkat, perkembangan teknologi, system informasi mengubah segenap pola interaksi, kultur baru pola interaksi yang terbangun jika tidak dimaknai secara arif tentu akan menimbulkan gelombang perubahan yang destruktif inilah tantangan kebangkitan bangsa kita di abad 21. Kemampuan berdialog dengan perubahan, menghadapinya dengan sadar, kemudian secara kolektif mem-proporsi-kan gelombang perubahan untuk kepentingan nasiona/ maka perubahan yang terjadi akan begitu bermakna bagi kita. Hakikat sosio nasionalisme dapat terwujud, menjadi bangsa yang setara dengan bangsa lain karena kearifan gagasan serta secara aktif mengupayakan tata dunia baru yang lebih berkeadilan.”⁶⁶

Mahatma Gandhi pernah berkata: “Saya seorang nasionalis, akan tetapi nasionalisme saya adalah perikemanusiaan”. Perkataan Gandhi ini juga dikutip Bung Karno dalam pidatonya di depan Sidang Umum ke-XV PBB, *“Bahwa Indonesia adalah bangsa yang nasionalis karena Indonesia percaya bahwa bangsa-bangsa adalah sangat penting bagi dunia di masa sekarang ini, dan tetap demikian, sejauh mata dapat memandang masa depan. Karena kami nasionalis, maka kami mendukung dan menganjurkan nasionalisme di mana saja kami jumpainya”*.⁶⁷

GMNI sebagai sebuah OKP yang berjiwa nasionalis Pancasila, berhasil menempatkan dirinya sebagai entitas gerakan mahasiswa yang mendidik kadernya memiliki wawasan patriotisme yang mantap, serta wawasan kebangsaan yang kuat, dan dengan semangat membara senantiasa siap sedia mempertahankan Pancasila, UUD 1945, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan separatisme.

Bagi GMNI, Ideologi adalah hal yang prinsip yang menjadi azas dan doktrin perjuangan GMNI. Sebab ideologi merupakan acuan pokok dalam penentuan format dan pola operasional gerakan. Yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.

⁶⁶ Pidato Politik Dedy Rahmadi, Ketua Presidium GMNI dalam Pembukaan Rakornas GMNI. Bekasi, 28 April 2008

⁶⁷ Pidato Ir. Soekarno dalam Sidang Umum XV PBB

Adapun bagi Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir, Nasionalisme merupakan alat diskriminasi bagi Islam. HTI adalah sebuah organisasi dengan ideologi Islam yang tertutup. Bagi HTI, isme apapun selain Islam bersifat sekular. Dalam hal ini termasuk nasionalisme. Baik secara filosofis maupun historis, nasionalisme adalah produk dari sekularisme Barat. Juru bicara HTI, Ismail Yusanto berpandangan bahwa ‘nasionalisme bermakna pengabdian tertinggi harus diberikan kepada bangsa dan tanah air.’ Dasar filosofi ini bertentangan dengan cita-cita Islam yang menegaskan bahwa pengabdian tertinggi semestinya diberikan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Ismail menolak nasionalisme sebagai sebuah filosofi. Ia harus diturunkan sebagai praktik dan strategi. Dengan menurunkannya sebagai praktik dan strategi, maka tidak ada absolutisme dalam makna nasionalisme. Ismail memandang ‘bangsa’ dan ‘tanah air’ hanyalah kategori yang bersifat politis dan sementara. Kategori itu tidak bisa ditransendensikan sebagai basis pembentukan ideologi. Kepentingan seseorang untuk ‘bangsa’ dan ‘tanah air’ adalah kepentingan yang bersifat material yang dituntut oleh sejarah.

“Yang pasti secara historis, Indonesia adalah tempat lahir saya, negeri, dan bangsa saya. Saya punya tanggungjawab ia punya masa depan yang lebih baik di masa depan. Tapi yang membedakan caranya membuat baiknya itu.”⁶⁸

Dalam kerangka itu, nasionalisme sebagai praktik dapat diterjemahkan sebagai alasan-alasan historis mengapa seseorang perlu membela kepentingan bangsa, negara, tanah air, dan rakyatnya. Bagi Ismail, alasan-alasan historis tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu karena pengalaman orang tentang bangsa bersifat berlainan satu sama lain. Dalam era globalisasi, batas-batas yang memisahkan bangsa bersifat sangat labil dan rapuh. Seseorang bisa berpindah-pindah kewarganegaraan sekehendak hatinya. Bangsa berlawanan dengan kodrat alami manusia untuk berkembang dan melakukan mobilisasi. Sementara bangsa selalu mengikatkan diri dengan lokalitas. Oleh karena itu slogan-slogan seperti tanah air dan ibu pertiwi dimunculkan untuk menggambarkan ikatan bangsa dengan aspek ruang yang membatasinya. Secara historis, Indonesia sebagai bangsa adalah sebuah paradoks di satu sisi dan berkah di sisi lain. Menjadi

⁶⁸ Wawancara dengan Ismail Yusanto

paradoks karena sebagai bangsa merupakan warisan penjajahan Eropa dan, dengan demikian, menyerap produk budaya dan menerapkan aturan hukum mereka. Ikatan mereka yang disebut bangsa Indonesia kepada Indonesia sebenarnya hanya kepada tanah dan, dalam batas tertentu, budaya lokal mereka. Dalam perspektif HTI, Eropa adalah representasi dari bangsa kafir yang budayanya tidak seharusnya bercokol di Indonesia. Namun, di sisi lain, Indonesia adalah berkah yang diberikan oleh Islam. Ismail mengutarakan bahwa perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam mampu membebaskan Tanah Hindia Timur dari penjajahan bangsa-bangsa kafir. Perlawanan umat Islam terhadap hegemoni bangsa asing tersebut pada dasarnya tidak lahir dari spirit nasionalisme, namun dari tuntutan agama yang mewajibkan seseorang membela tanah airnya.⁶⁹

Ismail menyontohkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar NU, Hadratusy Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari saat revolusi fisik berlangsung pada tahun 1945. Resolusi itu, menurutnya, tidak muncul dari spirit nasionalisme, namun lahir dari spirit keislaman. Hal yang sama juga melingkupi para aktivis gerakan nasional dari kalangan Islam seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim. Bagi mereka, menjadi pejuang kemerdekaan lebih merupakan kewajiban religius daripada tuntutan spirit kebangsaan itu sendiri. Hal terbukti dari bagaimana mereka mengaktualisasikan rasa kebangsaan tersebut. Kedua tokoh tersebut memperjuangkan kemerdekaan bangsa mereka lewat suatu organisasi yang bernama Sarekat Islam (SI) dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Agus Salim bahkan mendidik para pemuda muslim yang kelak menjadi aktivis pergerakan nasional dalam organisasi pemuda bernama Jong Islamieten Bond (JIB). Sebagai organisasi berideologi Islam, memori HTI tentang tahap-tahap pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak bisa lepas dari ingatan tentang peran historis dan simbolik Islam. Bagi HTI, Islam adalah identitas utama yang membentuk Indonesia dan menyatukan warga Nusantara. Orang pribumi di masa lalu akrab dengan sebutan 'orang selam', mengacu pada Islam. Apalagi, bahasa Melayu yang menjadi *lingua franca* bagi penduduk Nusantara banyak dipengaruhi

⁶⁹ Wawancara dengan Ismail Yusanto

oleh peradaban Arab Muslim. Bahasa Melayu itulah yang kemudian ditransformasikan sebagai bahasa nasional Indonesia yang dikenal sekarang ini.

Hal berbeda ketika kita lihat bagaimana pandangan KAMMI terhadap nasionalisme. Sebagai organisasi yang berbasas Islam seperti Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir, ternyata KAMMI memiliki cara pandang berbeda tentang nasionalisme. Bagi KAMMI, nasionalisme merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Cinta terhadap tanah air merupakan bentuk dari cinta terhadap agama. Aplikasi dari rasa nasionalisme dengan Islam diterjemahkan KAMMI dalam pola kaderisasi yang bernama Muslim Negarawan.

Dalam konsep Muslim Negarawan, terdapat lima model ciri yang melekat di dalamnya. Yaitu, *pertama*, pemahaman agama yang mendalam. Pemimpin mewakili ideology mayoritas rakyatnya. Sehingga pengetahuan dan implementasi ajaran Islam dalam diri seorang pemimpin menjadi kekuatan yang dapat dijadikan teladan bagi rakyat. Tidak peduli bentuk Negara yang dijalankan, bahkan yang paling liberal sekalipun, agama tetap menjadi barometer moral untuk pemimpin. Umumnya Negara-negara Eropa dan Amerika masih menerapkan hal ini dalam memilih pemimpinnya. Republik Indonesia juga harus dipimpin oleh seorang Muslim Negarawan yang inklusif dan berjanji akan membangun negeri bersama seluruh komponen bangsa. Agama tidak dijadikan sebagai pelengkap predikat untuk meraih kekuasaan. Tapi menjadi spirit perbaikan dan pembangunan masyarakat madani yang toleran dan demokratis.⁷⁰

Kedua, Idealis dan Konsisten. Syarat penting meraih kepemimpinan adalah konsistensi pada idealisme dan garis perjuangan yang senantiasa berpihak pada rakyat. Idealis dan konsisten tercermin sebagai kredibilitas moral seorang pemimpin yang terus diperhatikan publik. Inilah yang kemudian menjadi penilaian rakyat sebelum menjatuhkan pilihan pada calon pemimpinnya.⁷¹

Ketiga, Ilmu yang luas dan pemikiran yang mapan. Pemimpin harus lebih dari rakyatnya pada sisi intelektualitas dan wawasan. Intelektualitas dapat dinilai dari kualifikasi akademis dan kepakarannya, serta perhatiannya terhadap satu masalah secara mendalam, misalnya ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan,

⁷⁰ Amrullah, Taufik. *Muslim Negarawan, Spirit Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: KAMMI Pusat, 2008. Hal 119

⁷¹ *Ibid.* Hal 119-120

dan lainnya. Sedangkan wawasan yang luas menuntut pemimpin harus generalis, memahami berbagai hal untuk mengambil keputusan dan tindakan.⁷²

Keempat, terlibat langsung dalam pemecahan masalah umat dan bangsa. Setiap pemimpin akan dinilai *track-record*-nya dalam pemecahan masalah di setiap level kepemimpinannya. Pemimpin puncak harus mengambil keputusan setiap saat dengan berbagai variasi masalah yang melatarinya, dan hampir semuanya pelik dan dilematis. Karena itu seorang pemimpin harus berpengalaman dalam banyak model pengambilan keputusan, percaya diri berkarakter dan berani.⁷³

Kelima, menjadi perekat berbagai komponen demi kemajuan bangsa. Kapasitas diplomasi dan jaringan harus teruji bagi setiap pemimpin dan calon pemimpin. Pemimpin adalah representasi satu atau beberapa kelompok yang sekaligus harus mengelola berbagai kelompok masyarakat dengan perspektif yang beragam. Dia harus menguasai nilai budaya lokal dan global, namun juga memiliki fleksibilitas dan kecerdasan dalam memimpin.⁷⁴

Muslim negarawan juga merupakan bentuk lain dari hubungan antara Islam dan Nasionalisme. Islam dan Nasionalisme bukanlah dua hal yang harus saling dipertentangkan. Untuk itu, KAMMI sepatutnya dengan konsep nasionalisme religius.

*“Pada dasarnya Islam itu bersifat global. Dan Nasional bersifat lokal. Dan ini terlihat kontradiktif, padahal tidak. Islam itu bisa hadir dalam bunyi-bunyi nasionalis. Tapi yang dibangun adalah nasionalisme religius. Jadi ada saatnya kecintaan pada nasional, dan saat yang sama juga dihadirkan kecintaan pada agama.”*⁷⁵

Globalisasi bagi KAMMI merupakan peluang, karena globalisasi merupakan ruang netral yang bagi siapapun dapat masuk dan memanfaatkannya.⁷⁶ Karena sebenarnya, ada satu benang merah yang terbentang antara nasionalisme dengan Islam ketika berhadapan dengan globalisasi. Perlawanan terhadap globalisasi kini merupakan refleksi atau cerminan dari penentangan gerakan nasionalis dan gerakan Islam terhadap imperialisme-kolonialisme Barat pada masa lalu. Namun,

⁷² *Ibid.* Hal 120

⁷³ *Ibid.* Hal 120

⁷⁴ *Ibid.* Hal 120

⁷⁵ Wawancara dengan Rijalul Imam

⁷⁶ Wawancara dengan Rijalul Imam

di dalam menghadapi globalisasi, ketika Negara-bangsa sendiri menghadapi krisis identitas dan dipaksa untuk mengurangi peran-peran tradisionalnya, gerakan Islam muncul untuk melakukan berbagai bentuk perlawanan yang sifatnya lintas batas Negara dan bangsa. Apapun reaksi terhadap globalisasi, sebenarnya keduanya sedang menghadapi kolonialisme baru abad ini dengan sponsornya yang tetap sama: imperialisme.

Dahulu, ketika berjuang menghadapi penetrasi Barat, Islam dan Nasionalisme berdebat panjang dan sulit dicarikan titik temunya. Kasus debat Soekarno dengan Natsir-Salim Hassan di Indonesia dan diskursus pan-Islamisme dengan pan-Arabisme di Timur Tengah menunjukkan betapa sulitnya hal itu dilakukan. Dulu, Soekarno yang berusaha mempersatukan kelompok nasionalis dan Islam di Indonesia, menyebut bahwa penjajahan Barat sebagai alat pemersatu antara keduanya. Bahkan jargon anti-Baratnya itu berusaha pula menarik orbit kekuatan komunis, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia dengan konsep nefo-oldefonya. Tetapi Soekarno gagal di tingkat filosofi dan praksis. Proyek nasakomnya gagal karena adanya unsur komunis yang sulit bersanding dengan agama. Kini, kekuatan riil itu ada di Indonesia. KAMMI menurut peneliti berhasil memadukan antara nasionalisme dan Islam dengan bahasa yang lebih dapat diterima tanpa memperlihatkan sisi-sisi fundamentalisme agama. Meskipun masih baru terlihat di tingkat filosofis dan belum menyentuh tingkat praksis. Namun setidaknya langkah-langkah yang dilakukan KAMMI menambah diskursus keterkaitan nasionalisme dan Islam.

Bentuk hubungan nasionalisme dengan agama juga dijabarkan secara konkrit oleh KMHDI. Kesadaran nasionalisme juga harus ditanamkan pada kader-kader KMHDI, dengan pemikiran, dimanapun kader KMHDI berada di wilayah politis Indonesia, semuanya adalah bagian dari tanah air Indonesia. KMHDI berpendirian bahwa tanah air ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia, tidak diperkenankan adanya klaim monopolistis dari satu golongan terhadap golongan yang lain. Walaupun keadaan saat ini belum seideal yang diinginkan, kader-kader KMHDI harus yakin bahwa masih ada hari esok, untuk itu KMHDI akan menyiapkan kader-kadernya untuk hari ini dan hari yang akan datang.

Nasionalisme adalah sebuah penerjemahan dari keinginan anggota KMHDI untuk melakukan darma negara. Nasionalisme yang dianut bukan nasionalisme chauvinis, akan tetapi nasionalisme yang tumbuh dari perasaan senasib dengan saudara sebangsa (solidaritas) dan perasaan saling menghormati dengan saudara lain bangsa. Nasionalisme diartikan sebagai sebuah rasa ikut memiliki bangsa dan karenanya ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari bangsa itu sendiri.

“Sebagai sebuah bagian dari komponen bangsa, anggota KMHDI harus memandang komponen bangsa yang lain sebagai saudara, dengan memposisikan diri sebagai warga negara yang menentang bentuk-bentuk masyarakat yang eksklusif dalam wujud primordialitas atau sektarianisme. Anggota KMHDI harus secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan sebuah negara-bangsa.”⁷⁷

Sebagai individu-individu yang memiliki keperdulian akan perjalanan bangsa, umat manusia dan agama, Anggota KMHDI harus mengambil posisi sebagai manusia yang progresif, siap akan perubahan, menjadi pionir perubahan dan bukan hanya menunggu suatu perubahan terjadi. Kader KMHDI harus selalu berada pada garda terdepan dalam suatu proses perubahan yang diyakini akan mampu memperbaiki situasi. Sejarah telah membuktikan, bahwa progresifitas pemikiran dan tindakan, sangat diperlukan pada saat suasana kemandegan menghantui gerak langkah kemanusiaan. Progresifitas yang dianut, hendaknya adalah sebuah progresifitas yang mewujudkan, anggota KMHDI harus selalu siap untuk berada pada lapisan terdepan dan bukan hanya sebagai pengikut pasif yang reaksioner.

Dalam terminologi KMHDI, progresifitas berarti bahwa anggota KMHDI harus menjadi orang-orang yang menelurkan ide, melaksanakan ide tersebut dan siap akan proses dialektika dari ide tersebut. Proses dialektika yang akan melahirkan tesa, antitesa dan akhirnya mewujudkan sintesa yang akan terus berulang. Proses dialektika dan bentuk gerakan yang progresif, harus diyakini sebagai sebuah langkah konstruktif bagi perbaikan bangsa, kemanusiaan dan agama.

Bagi KMHDI, globalisasi adalah realitas kontemporer yang memiliki wajah ganda; peluang dan ancaman. Peluangnya adalah berbagai fasilitas teknologi dan

⁷⁷ Wawancara dengan Wayan Sudane

nilai-nilai universal yang tersebar melaluinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Sedangkan ancamanya adalah sistem kapitalisme global yang membuka persaingan berdasarkan nilai dan kualitas. Persaingan itu bukan hanya pada level negara, namun juga individu. Menurut KMHDI, negara-negara yang tidak siap bersaing akan mengalami intervensi oleh negara-negara kuat. Bagaimana dengan individu? Menurut KMHDI, kapitalisme mengusung semangat individualisme dan pragmatisme. Dalam kaitan ini maka di samping negara-bangsa mengalami krisis kewibawaan, seorang warganegara juga berpotensi mengalami krisis loyalitas karena naluri pragmatismenya. Terlebih jika pragmatisme itu ditunjang oleh alasan-alasan primordial lainnya.

Indonesia adalah sebuah Negara yang plural. Bagi KMHDI, nasionalisme merupakan salah satu wujud dari kualitas kader KMHDI yang wajib ada. Karena dengan menciptakan nasionalisme di tataran kader, KMHDI akan turut menciptakan konsep Negara-bangsa yang jauh dari primordialisme dan sektarianisme. Bagi KMHDI nasionalisme adalah alat untuk menciptakan rasa solidaritas dan saling menghormati.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa KMHDI memiliki corak wacana nasionalisme yang lebih khas. KMHDI masih bergumul dengan proyek identitas dalam hal bagaimana menempatkan dirinya sebagai kelompok minoritas ke dalam arus utama bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, peran negara-bangsa sangat penting. Formasi diskursif dari nasionalisme KMHDI dicirikan oleh upaya dekonstruksi terhadap peran negara secara historis, namun rekonstruksi terhadapnya sebagai sebuah ide. Negara lama yang otoritarian dan diskriminatif harus digantikan oleh negara baru yang lebih mampu melindungi dan menyejahterakan seluruh warganya tanpa kecuali. Oleh karenanya, bagi KMHDI, demokrasi dan hukum harus dijunjung tinggi dalam sebuah Negara. Karena demokrasi dan hukum adalah manifestasi kebangsaan.

E.3. Gagasan OKP Terhadap Identitas Nasional

UUD 1945 Republik Indonesia menyatakan dengan tegas tentang realitas multikultur bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut dilukiskan di lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Kebhinnekaan masyarakat dan bangsa Indonesia diakui bahkan dijadikan sebagai dasar perjuangan nasional permulaan abad-20. Tidak

kurang dari Manifesto Politik tahun 1925 yang dirumuskan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Eropa pada waktu itu yang mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai oleh persatuan dari suku-suku bangsa Indonesia yang beragam.⁷⁸ Manifesto politik tersebut mendahului sumpah pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mengikrarkan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku bangsa dan bertekad sebagai satu bangsa yang besar yang mempunyai satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Inilah cita-cita yang telah mengikat berbagai suku bangsa tersebut untuk melepaskan diri dari ikatan kolonialisme Belanda.

Di dalam transisi ke arah kesadaran nasional tersebut peranan kebudayaan memang perlu diperhatikan. Di dalam kaitan ini, perlu disimak kontribusi studi dari Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) di Universitas Birmingham. Raymond Williams di dalam bukunya *Culture and Society* (1958) menyarankan untuk membawa kembali budaya di dalam studi masyarakat. Menurut Raymond Williams pengertian kebudayaan (*culture*) mempunyai banyak arti: 1) kebudayaan sebagai proses intelektual, spiritual, dan estetik dari seseorang individu; 2) kebudayaan sebagai gaya hidup (*way of life*); 3) Kebudayaan sebagai hasil karya dan praktik intelektual khususnya dalam bidang artistik; dan 4) Kebudayaan sebagai suatu sistem yang signifikan melalui sistem tersebut dikomunikasikan keteraturan sosial (*social order*), bahkan direproduksi dan dihayati serta dikembangkan oleh individu serta masyarakat.

Rumusan Raymond Williams mengenai kebudayaan tersebut di atas sangat penting di dalam mengikuti perkembangan nasionalisme dan identitas suatu bangsa. Identitas nasional atau identitas bangsa merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang di dalam komunitasnya. Nasionalisme akan tampak di dalam kenyataan apabila rakyat biasa sebagai penyandang identitas membayangkan dirinya sendiri sebagai anggota dari komunitas yang abstrak. Inilah yang dimaksudkan oleh Benedict Anderson dalam tulisannya di *Imagined Community* (1993) yaitu merasa suatu bagian dari komunitas yang digambarkan berupa keanggotaan seseorang terhadap

⁷⁸ Tilaar, H.A.R., *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. Hal. xxii

komunitas bangsanya. Bangsa yang menggambarkan adanya suatu *imagined communities* menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di dalam satu kesatuan. Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasional.⁷⁹

KMHDI memandang bahwa identitas nasional muncul dan dibentuk dari identitas lokal. Yaitu budaya-budaya lokal dan agama. Yang semuanya dibingkai dalam konsep Bhineka Tunggal Ika. Wayan mengatakan bahwa Indonesia perlu memunculkan budaya Indonesia sebagai kesatuan dari budaya-budaya lokal yang ada. Hal ini sebagai ciri Indonesia di dunia internasional.⁸⁰

*“bagaimana pemerintah mengakomodir budaya-budaya lokal, sebuah dorongan untuk maju ke kancah nasional kemudian dikolaborasi sebagai budaya Indonesia. Kalau selama ini contohnya, Bali, di Internasional orang bahkan lebih tahu Bali dari pada Indonesianya, pemerintah bisa melakukan it pada daerah2 lainnya yang dikolaborasi sebagai budaya Indonesia.”*⁸¹

Untuk itu, KMHDI melihat identitas nasional berakar dari pluralitas yang ada di Indonesia. Jika pluralitas telah menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (*pluralistic society*), maka kebutuhan yang segera muncul bukan meredam dan menyembunyikan pluralitas yang ada, atau memaksanya agar menyatu. Melainkan memberikan ruang terbuka agar berbagai perbedaan tersebut muncul ke permukaan, berkelindan, dan berdialektika dengan wajar. Dalam ruang terbuka tersebut berbagai perbedaan dihubungkan oleh garis kolinier yang menurut KMHDI disebut demokrasi

Adapun bagi GMNI, identitas nasional dibentuk oleh negara, dibingkai dalam sebuah paham dan landasan dasar yang bernama Pancasila, dan diturunkan kepada rakyat. GMNI memilih Pancasila sebagai identitas nasional, karena Pancasila merupakan rumusan lengkap tentang Indonesia secara utuh hasil pemikiran dan dialektika para *founding fathers* Indonesia dengan berbagai latar belakang pemikiran, agama, dan budaya.

⁷⁹ Anderson, Benedict, *Imagined Communities (terjemahan)*, Yogyakarta: Insist 2002

⁸⁰ Wawancara dengan Wayan Sudane

⁸¹ Wawancara dengan Wayan Sudane

Identitas nasional diperlukan untuk membentengi Indonesia dari derasnya arus globalisasi.⁸² Yang oleh GMNI, arus globalisasi di abad 21 ini disebut juga sebagai abad tanggung langgang. Yang dimaksud abad tanggung langgang adalah:

“Abad tanggung langgang yang dimaksud adalah perubahan tatanan dunia begitu sangat cepat berderap baik tata politik, ekonomi dan kebudayaan. Semua ternisbikan karenanya jarak, ruang dan waktu menjadi singkat, perkembangan teknologi, system informasi mengubah segenap pola interaksi, kultur baru pola interaksi yang terbangun jika tidak dimaknai secara arif tentu akan menimbulkan gelombang perubahan yang destruktif inilah tantangan kebangkitan bangsa kita di abad 21. Kemampuan berdialog dengan perubahan, menghadapinya dengan sadar, kemudian secara kolektif mem-proporsi-kan gelombang perubahan untuk kepentingan nasional/ maka perubahan yang terjadi akan begitu bermakna bagi kita. Hakikat sosio nasionalisme dapat terwujud, menjadi bangsa yang setara dengan bangsa lain karena kearifan gagasan serta secara aktif mengupayakan tata dunia baru yang lebih berkeadilan.”⁸³

Pancasila menurut GMNI merupakan dasar Negara yang tidak bisa tergantikan. Pancasila merupakan hasil pemikiran dari para *founding fathers* yang merumuskan bahwa Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan agama karena terdiri dari beragam agama dan juga harus mengayomi beragam budaya yang ada di dalamnya. Agar dapat memahami dan memaknai Pancasila, maka seluruh kader GMNI wajib membaca antara lain: pidato Bung Karno tentang “Lahirnya Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945, kuliah Pancasila tentang “Pancasila Dasar Negara” yang disampaikan oleh Bung Karno di Istana Negara, dan pidato Bung Karno di depan Sidang Majelis Umum PBB tahun 1960 yang berjudul “Membangun Dunia Baru”.

Identitas nasional juga berasal dari budaya daerah yang bergabung menjadi budaya nasional. Khusnul mengatakan bahwa identitas nasional adalah kristalisasi budaya-budaya lokal menjadi budaya nasional, ataupun kristalisasi dari beragam warna menjadi sebuah warna nasional.⁸⁴

Identitas nasional dalam konteks budaya Indonesia ini menjadi penting karena terkait dengan pengakuan akan bangsa Indonesia dan bentuk penerjemahan

⁸² Wawancara dengan Khusnul Hidayat

⁸³ Pidato Politik Dedy Rahmadi, Ketua Presidium GMNI dalam Pembukaan Rakornas GMNI. Bekasi, 28 April 2008

⁸⁴ Wawancara dengan Khusnul Hidayat

dari konsep trisakti-nya Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik dan berkepribadian dengan budaya.⁸⁵

Senada dengan KMHDI, KAMMI memandang bahwa identitas nasional merupakan perwujudan dari identitas-identitas lokal termasuk muatan agama di dalamnya. Karena Islam merupakan agama mayoritas, maka sudah sepatutnya Islam menjadi nilai-nilai yang diadopsi dalam identitas nasional. Karena sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai-nilai universal.⁸⁶

Namun dalam hal ini, KAMMI tidak akan memaksakan nilai-nilai yang berada dalam Islam sebagai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia secara mutlak. Karena menurut Rijal, inti dari budaya adalah kesadaran. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mengakomodasi kebudayaan yang sudah berkembang dengan baik.⁸⁷

Gema Pembebasan juga memandang perlu akan adanya identitas nasional sebagai ciri dan karakter bangsa. Sama dengan KAMMI, Gema Pembebasan juga melihat bahwa Islam merupakan jiwa dari karakter dan identitas nasional. Hal ini atas dasar Islamlah yang meyatukan Indonesia. Dan identitas nasional sebaiknya agama, karena agama keluar dari lintas geografi, wilayah, dan teritorial.

Bagi HTI, spirit Islam merupakan inspirasi awal yang melahirkan para tokoh pergerakan nasional mulai yang beraliran nasionalis hingga komunis. Menurutnya, figur-figur seperti Soekarno dan Hatta adalah figur-figur yang memiliki latar belakang pengaruh keislaman yang cukup kuat. Soekarno dididik secara langsung, tinggal secepat, dan banyak mendapatkan wawasan dari Tjokroaminoto. Ia bahkan sempat menjadi menantu Tjokroaminoto. Demikian halnya Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden ini adalah keturunan dari ulama terkemuka di Sumatera Barat. Setelah pensiun ia bahkan sempat menyponsori pendirian sebuah partai Islam, yakni Partai Umat Islam. Hal yang sama juga terjadi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini dilahirkan oleh para aktivis Sarekat Islam (SI) dan, dengan demikian, memiliki visi keislaman tertentu. Ia melihat bahwa komunisme awal sejatinya adalah suatu ekspresi pemikiran

⁸⁵ Wawancara dengan Khusnul Hidayat

⁸⁶ Wawancara dengan Rijalul Imam

⁸⁷ Wawancara dengan Rijalul Imam

sosial kemasyarakatan, bukan ideologi atau teologi. Komunisme sendiri tidak jauh berbeda dengan sosialisme, nasionalisme, atau kapitalisme. Menurutnya, perlu dibedakan antara pemikiran sosial kemasyarakatan dengan teologi. Para aktivis komunis seperti Tan Malaka dan DN Aidit, menurutnya, secara teologis adalah Muslim dan, dalam batas-batas tertentu, memiliki cara mengungkapkan ekspresi keislaman mereka. Pandangan HTI tentang komunisme ini menarik mengingat antagonisme yang begitu tinggi di kalangan para politisi Islam di Indonesia. Para politisi Islam pada umumnya menganggap bahwa komunisme identik dengan ateisme dan anti agama. Dalam kaitan itu Ismail menguraikan:

“Itu kalau saya lihat pada pemikiran sosial kemasyarakatan, bukan pada teologinya. Orang seperti Tan Malaka secara teologis Muslim, tapi secara sosial kemasyarakatan dia komunis. Ideologinya lah. Itu adalah sebuah proses yang belum selesai. Itu bukan gejala yang aneh karena sekarang pun terjadi. Misalnya, anak-anak muda aktivis organisasi islam di kampus itu. Dia tetap solat, tahajud, puasa, tapi pikirannya komunis. Bukan komunis dalam arti teologi tapi ideologi. DN Aidit itu pribadi yang masih nampak keislamannya, dia masih ingat Tuhan. Islamnya masih ada.”⁸⁸

HTI melihat warna sejarah Indonesia adalah Islam dalam hampir semua hal. Namun, menurut Ismail, terdapat upaya sistematis untuk menggiring arah sejarah Indonesia ke arus sekular. Ia mempersamakan fenomena ini dengan apa yang terjadi dengan keruntuhan khilafah di Turki pada tahun 1924. Menurutnya, Khilafah Islamiyah di Turki runtuh atas upaya bangsa-bangsa Barat. Ia menyebut Mustafa Kemal Attaturk, bapak pendiri negara Turki modern, sebagai agen Inggris. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Kaum orientalis Belanda, menurut Ismail, telah lama menginginkan suatu akulturasi antara budaya Barat dan Hindia. Hal itu diharapkan akan memperkuat loyalitas pribumi terhadap Ratu Belanda dan dengan cara akulturasi itulah Belanda dapat meredam potensi perlawanan dalam diri Islam. Strategi itu tidak sepenuhnya gagal dan juga tidak sepenuhnya berhasil.⁸⁹

Secara politik, taktik orientalis itu justru menjadi bumerang. Akulturasi membuat kaum pribumi mudah masuk ke dalam akses-akses vital dari politik dan kebudayaan Belanda. Hal itu membuat mereka lebih memahami penjajahan dari sisi para penjajahnya sendiri. Sementara di sisi kebudayaan, taktik kaum orientalis

⁸⁸ Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁸⁹ Wawancara dengan Ismail Yusanto

tersebut menjadi sangat berhasil. Mereka mampu membuat kaum pribumi 'kagum' terhadap keluhuran budaya Barat dan ilmu pengetahuan yang dibawanya. Mereka menganggap bahwa untuk menjadi bangsa yang besar semestinya meniru bangsa Barat dan mewarisi tradisi pengetahuannya. Mereka mempelajari filsafat Yunani, namun tidak dibuat untuk tahu bahwa yang mengembangkan filsafat Yunani tersebut dan memperkenalkannya kembali ke dunia Barat adalah para filsuf Muslim di Timur Tengah di saat Barat sedang dirundung kabut Abad Kegelapan. Para orientalis Barat tersebut telah berhasil melahirkan para sekularis Muslim seperti Achmad dan Hussein Djajadiningrat dari Banten hingga Tan Malaka dari Sumatera Barat.

E.4. Gagasan OKP Terhadap Negara-Bangsa

Setiap OKP membangun gagasan negara-bangsa masing-masing. Bagi Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir Indonesia, negara-bangsa harus berupa khilafah. Untuk itu, perlu kiranya kita mengupas lebih dalam apa yang dimaksud dengan khilafah versi Gema Pembebasan dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir dan Gema Pembebasan bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, system perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali⁹⁰.

Hizbut Tahrir (HT) adalah suatu organisasi politik yang bersifat transnasional. Ia memiliki jaringan yang luas di seluruh dunia internasional. Watak internasional ini diperlukan karena ia memiliki cita-cita yang bersifat internasional pula. Misi utama didirikannya HT adalah menghidupkan kembali khilafah Islamiyah di muka bumi. Khilafah islamiyah adalah sebuah sistem kenegaraan yang dipimpin oleh khalifah sebagai kepala negara. Khilafah islamiyah mengacu kepada sejarah kepolitikan Islam yang dilalui oleh bangsa Arab pasca wafatnya Nabi Muhammad. Para pemimpin politik setelah Nabi tersebut menggelari diri sebagai khalifah. Hal itu terus berlanjut hingga pada masa bertumbuhnya dinasti-dinasti Islam. Institusi khalifah terakhir dipegang oleh

⁹⁰ *op.cit.* HTI, 2004

dinasti Ottoman Turki yang akhirnya dilikuidasi oleh parlemen Turki pada tahun 1924. Semenjak itu, tiada lagi sebutan khalifah bagi para pemimpin dunia Islam. Menurut Ismail Yusanto, di masa lalu khilafah islamiyah selalu menjadi pusat yang menyatukan masyarakat Islam di seluruh penjuru bumi. Pusat-pusat itu berpindah-pindah dari satu Negara ke negara lain; dari Madinah, Syiria, Irak, bahkan pernah di Spanyol, India, hingga Turki.⁹¹

Sistem khilafah mencakup suatu pemerintahan Islam yang mendasarkan diri pada syariat Islam. Penyelenggaraan suatu syariat Islam menurut HT hukumnya wajib bagi segenap kaum Muslimin. Sepanjang syariat belum ditegakkan, maka HT memandang bahwa masyarakat tengah hidup pada masa jahiliyah. Ini adalah analogi dari kehidupan masyarakat Arab pra Islam. Kehidupan jahiliyah modern ditandai oleh berkembangnya sistem kapitalisme dan ideologi sekularisme yang merusak. Kedua hal itu sama sekali tidak menawarkan kesejahteraan dan cenderung menimbulkan kerusakan moral bagi umat manusia secara umum. Dalam risalah HT disebutkan bahwa partai ini bertujuan menegakkan suatu tata masyarakat islami di mana seluruh kegiatan kehidupan diatur lewat syara' di bawah naungan daulah islamiyah. Seorang khalifah yang memimpin daulah islamiyah diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Risalah Islam ini akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Disebutkan pula bahwa HT akan bekerja mengembalikan umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya. Menurut mereka, daulah islamiyah akan menjadi Negara *superpower*.

Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negarane-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.⁹²

⁹¹ Wawancara dengan Ismail Yusanto

⁹² *OpCit.* HTI 2004

Apa yang menjadi kerja HT, dengan demikian, adalah suatu islamisasi global yang diwujudkan lewat jalur politik. Mereka melihat khilafah dan khalifah adalah syarat mutlak untuk mewujudkan misi tersebut. Seperti halnya gerakan revivalisme pada umumnya, islamisasi dunia lewat jalur politik ini akan diwujudkan dengan sejumlah tahapan yang, menurut Hizbut Tahrir, diacu dari metode dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tahapan-tahapan tersebut adalah; tahap pembinaan (*marhalah al-tatsqif*), tahap berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*), dan tahap penerimaan kekuasaan (*marhalah istislam alhukm*). Tiap-tiap tahapan ini akan terus berlangsung hingga negara khilafah menjadi kekuatan yang obyektif di dunia.⁹³ Lantas di mana suatu negara khilafah akan berpusat kelak ketika terbentuk? Ia akan berpusat di suatu negara yang telah terlebih berhasil membentuk sistem khilafah demikian. Singkatnya, ketika suatu partai HT di sebuah negara berhasil memenangkan suara rakyat, maka ia akan segera membentuk sistem khilafah dan organisasi-organisasi HT di berbagai negara akan tunduk ke pusat baru tersebut sembari tetap berjuang meraih kemenangan rakyat di negara lain.⁹⁴

GP memandang globalisasi secara optimistik. Globalisasi adalah emas karena ia adalah buah dari kemajuan. Sumbangan terbesar globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi. Teknologi ini bermanfaat dalam membuat interaksi manusia yang lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan teknologi tersebut, pengetahuan yang awalnya bersifat lokal secara pesat bisa menjadi translokal. Ismail mengungkapkan bahwa globalisasi membawa bersamanya penyeragaman dalam empat f: *food, fashion, fun, faith*. HTI, dengan demikian, mendapat berkah besar dari globalisasi. Berkat globalisasi, hizbut-tahrir yang mulanya suatu gerakan lokal di Timur Tengah telah bertransformasi menjadi gerakan global. Globalisasi juga dipandang akan mampu mempercepat cita-cita khilafah terwujud dalam kenyataan. Keyakinan (*faith*) tentang datangnya khalifah ini mulai menyapu kesadaran warga Muslim di penjuru dunia. Kesadaran ini kelak akan bertransformasi menjadi suatu gerakan global. Ismail memandang bahwa globalisasi juga menjadi pertanda bagi krisis negara-bangsa. Di saat individu-individu telah menjalin interaksi lintas-bangsa, masyarakat sipil mengorganisir

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Wawancara dengan Ismail Yusanto

diri dalam kelompok-kelompok yang beragam dan membangun jaringan lintas-negara, dan tata ekonomi dunia semakin terintegrasi, maka eksistensi sebuah negara-bangsa telah kehilangan relevansinya. Jamil mengambil contoh fenomena ekspansi buruh migran yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Buruh-buruh itu secara ekonomi mendapatkan keuntungan finansial dari negeri orang, menggantungkan hidup-mati mereka dari kebijakankebijakan ekonomi dan politik yang dibuat dalam negara setempat, dan hidup puluhan tahun dalam budaya asing. Di mata mereka sejatinya negara telah kehilangan alasan keberadaannya karena tidak bisa menjadi tempat menggantungkan hidup. Bayangan tentang bangsa lambat laun juga mulai memudar karena mereka harus siap beradaptasi dengan komunitas baru. transformasi kesadaran itu mungkin akan berjalan lambat untuk kalangan buruh, namun berjalan sangat cepat di kalangan kelas menengah seperti intelektual atau kaum professional.⁹⁵

Dalam situasi demikian, menurut Jamil, hanya ada satu hal yang bisa memberi individu kebutuhan akan identitas tanpa perlu bersusah payah membangun identitas baru. Identitas itu adalah agama. Yang dimaksud Ismail tentu saja adalah agama-agama besar monoteis. Ismail tidak melihatnya dari perspektif agama-agama lokal yang hidup dan bisa hidup dalam situasi lokalnya sendiri. Agama (universal) memberi ruang yang longgar bagi pembangunan identitas karena ia tidak pernah membatasi individu dalam sekat-sekat etnis, bangsa, ekonomi, atau sosial. Mereka yang menjadi asing dalam suatu negara akan lebih mudah beradaptasi ketika memiliki ikatan yang sama dalam hal agama dengan penduduk lokal. Namun, ia mengakui bila teori ini juga tidak bersifat mutlak. Hal itu juga bergantung pada perspektif seseorang dalam memandang agama dan solidaritas keagamaan. Dalam suatu masyarakat di mana sekularisme dan materialisme masih membekap kesadaran mereka, solidaritas keagamaan masih menjadi sebuah pilihan yang sulit. Namun, begitu kesadaran keagamaan tersebut telah tertanam kuat dalam suatu masyarakat, ia tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Ia berpotensi membentuk suatu ikatan yang kokoh. Jamil berteori bahwa kesadaran tentang kebangsaan dan kenegara-bangsaan adalah suatu kesadaran yang bersifat transisional. Ia tidak mengatakannya sebagai kesadaran

⁹⁵ Wawancara dengan Muthohar Jamil

semu, karena nasionalisme memang lahir dari alasan-alasan histories yang nyata. Ia mengatakan bahwa negara-bangsa adalah fenomena yang baru yang marak pada dekade 1930 hingga 1960-an. Melalui perspektif yang sangat khas HTI, Jamil lantas berteori tentang kehadiran dan kejatuhan negara-bangsa.

“Menurutnya, negara-bangsa di dunia Islam hadir karena runtuhnya khilafah islamiyah di Turki. Oleh karena itu, Bagaimana kita membandingkan antara sebab dan akibat. Negara-bangsa itu sebagai akibat dari sebab runtuhnya khilafah. Ini tidak akan ada kalau khilafah usmani tidak runtuh.”⁹⁶

Menurut Jamil, runtuhnya khilafah Islamiyah ini membuat negeri-negeri Muslim terpecah-pecah membentuk negara-bangsa baru. Negara-negara itu terutama terbentuk dari puing-puing kolonialisme Eropa. Mereka terbentuk sesuai pengalaman keterjajahan dan pengaruh politik yang diberikan oleh negara-negara Eropa tersebut. Hal ini karena tiap-tiap negara kolonial Eropa memiliki tanah jajahan di negeri-negeri Muslim yang berbeda-beda. Belanda memiliki Indonesia; Inggris memiliki Malaysia; Perancis memiliki Aljazair; Amerika memiliki Filipina; dan seterusnya. Secara tidak langsung, hal ini telah membuat umat Islam terpecah-pecah. Era kolonialisme tersebut berlangsung bersamaan dengan merosotnya pengaruh khilafah usmaniyah di Turki, sehingga otoritasnya tidak bisa membebaskan negeri-negeri Muslim dari penjajahan Eropa. Karena tidak ada lagi kekuatan pemersatu, maka identitas kebangsaan muncul dan menjadi argumentasi melawan penjajahan. Inilah asal usul berdirinya negara-bangsa.

Setelah menjelaskan asal-usul negara-bangsa, Jamil mulai menganalisis bagaimana keruntuhan negara-bangsa bisa terjadi. Negara-bangsa, bagi Jamil, memang ditakdirkan berumur singkat; satu hingga satu setengah abad. Manusia adalah *zoon politicon*, hewan politik. Sudah menjadi dasar manusia untuk saling menguasai satu sama lain. Dalam tata dunia kapanpun sebuah entitas politik super power senantiasa hadir; semenjak Imperium Romawi, Daulah Islamiyah, hingga Amerika Serikat. Setiap negara kuat akan membangun pengaruh atas negaranegara lain dan akhirnya menguasainya. Inilah tata dunia sekarang. Berakhirnya perang dingin adalah awal krisis negara-bangsa. Setelah masa itu, tata-dunia telah dikuasai oleh sebuah negeri *superpower* bernama Amerika

⁹⁶ Wawancara dengan Muthohar Jamil

Serikat. Namun, ia akan menimbulkan perlawanan. Persaingan politik pun terjadi kembali memperebutkan hegemoni atas dunia.

Salah satu bentuk perlawanan terhadap kekuatan *superpower* tersebut adalah maraknya fenomena regionalisme. Negara-negara Eropa mencoba melawan dominasi Amerika dengan membangun aliansi dan mengikatkan diri dalam komunitas baru Uni Eropa. Komunitas baru ini bahkan telah memiliki konstitusi dan mata uang bersama. Hal yang sama terjadi di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Beberapa negara besar seperti China dan India di Asia mulai mencoba hadir dan membawa pengaruhnya sendiri. Menurut Ismail, regionalisme adalah fase krisis kedua dari negara-bangsa. Setiap negara tidak bisa menghindar dari takdir ini. Masyarakat akan menjadi pragmatis untuk memilih jalan hidup yang memberi mereka kesejahteraan. Mereka yang masih kukuh dengan nasionalisme dengan sendirinya akan tergilas oleh kebodohnya.

*“Sekarang bagaimana jika franc berhenti, gulden berhenti, semua mengganti dengan Euro? Di mana nasionalisme? Anda akan memilih rupiah yang lembek atau mata uang yang universal, yang lebih kuat? Kalau nasionalisme buta, akan memilih rupiah. Mati loe! Sekarang di Malaysia, rupiah aja gak dipakai. Atas nama apa kita memegang nasionalisme? Atas nama kebodohan dan kepicikan.”*⁹⁷

Jamil mengatakan bahwa dalam tata dunia global kontemporer persaingan antara berbagai kekuatan politik dunia telah membawa dampak merugikan bagi negaranegara lemah. Sebagaimana umumnya para pengkritik globalisasi, Jamil juga berpendapat bahwa globalisasi telah menjadi media bagi mereka yang kuat tersebut untuk menindas negeri-negeri yang lemah. Hal ini karena globalisasi pada dasarnya dikendalikan oleh sistem kapitalisme neoliberal. Lembaga-lembaga dunia seperti WTO, WB, UN, dan IMF adalah agen-agen kapitalisme global yang menjadi kepanjangan tangan negara-negara kuat. Mereka membuat regulasi yang menguntungkan negara-negara kuat tersebut dan menghisap sumber daya Negara-negara lemah. Negara-negara lemah tersebut dipaksa secara semena-mena untuk bersaing dengan yang kuat dalam pasar bebas yang diciptakan oleh yang terakhir. Hasilnya tentu saja adalah kelestarian hegemoni yang kuat atas yang lemah.

⁹⁷ Wawancara dengan Muthohar Jamil

Adapun dalam literature HTI, sistem kapitalisme adalah anak kandung kolonialisme. Ia memiliki watak yang menindas dan rakus. Sistem semacam itu pada gilirannya akan menemui ajalnya. Krisis finansial di Amerika Serikat yang menjadi krisis global dan menghantam dunia sejak bulan September 2008 dipandang oleh HTI sebagai akhir dari kapitalisme. Sebuah artikel berjudul “Lehman Bangkrut, Kapitalisme Sekarat?” dalam majalah al-Wa’ie mengatakan, *Wall Street* tidak hanya serakah, tetapi juga kelewat banyak memainkan hutang. Akibatnya, struktur bisnis di sana gampang runtuh hanya oleh satu kesalahan sepele, mirip rumah kartu yang ambruk hanya oleh satu tiupan. demikianlah, sesungguhnya ekonomi kapitalisme benar-benar tidak menjanjikan apa-apa kecuali masa depan kebangkrutan.⁹⁸

Menurut Ismail Yusanto, krisis kapitalisme kali ini adalah puncak dari duapuluh kali krisis yang dialaminya dalam abad ini. Oleh karenanya, ketergantungan kepada kapitalisme sudah saatnya diakhiri. Hafidz Abdurrahman, Ketua Umum HTI, mengemukakan bahwa HTI sendiri telah berulang kali mengingatkan para penguasa di dunia akan bahaya kapitalisme. Pada tahun 1997, Hizbut Tahrir mengeluarkan booklet berjudul *Hazzat al-Aswaq al-Maliyah: Asbabuha wa Hukm as-Sayar’i fi Hadizhi al-Asbab* (Goncangan Pasal Modal: Sebab dan Hukum Syariah terkait dengan Sebab Ini). Hizbut Tahrir secara terbuka juga melakukan perdebatan intelektual dengan otoritas IMF tentang krisis, penyebab, dan solusinya. Solusi dari itu semua, menurut HTI adalah Islam. Hafidz Abdurrahman mengatakan, Momentum ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hanya Islam lah satu-satunya ideologi yang bisa menyelamatkan dunia.⁹⁹

Krisis kapitalisme ini bagi Hafidz Abdurrahman menjadi bagian dari krisis ideologi-ideologi besar dunia setelah imperialisme, sosialisme, komunisme, dan juga nasionalisme. Menurutnya, Islam adalah sebuah paket. Dalam dirinya sendiri, ia memiliki kapasitas untuk membangun suatu sistem politik, ekonomi, dan hukum yang kokoh. Paket Islam itu dikemas dalam satu bingkai, khilafah. Khilafah adalah konsep politik yang selaras dengan tuntutan globalisasi. Menurut HTI, krisis dan bencana telah menimpa kehidupan umat manusia selama 82 tahun karena tidak menganut sistem kekhilafahan Islam. Konsep negara-bangsa hanya

⁹⁸ Al-Wa’ie, No. 99, 2008: 11

⁹⁹ Jawa Pos, 19 Maret 2006

membuat dunia Islam terpecah-belah dan mudah dipengaruhi oleh negara-negara lain. Khilafah akan memberi umat suatu kepemimpinan politik yang kuat dan bersifat transnasional¹⁰⁰.

Bagi Jamil, nasionalisme harus disingkirkan demi 'kepentingan yang lebih besar.' Melepaskan kepentingan Indonesia yang lebih sempit untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar. Indonesia yang sempit adalah Indonesia yang terjebak pada sentimen nasionalisme buta yang mengekang, sedangkan kepentingan Indonesia yang lebih besar adalah kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Untuk membangun kesejahteraan diperlukan sistem ekonomi yang kokoh. HTI mengemukakan bahwa janji kesejahteraan yang dibawa oleh Islam memang tidak seinstan yang disajikan kapitalisme dalam rezim negara-bangsa, namun ia memberi fondasi yang lebih kokoh. Jika sistem ekonomi Islam ditegakkan, pertumbuhan ekonomi memang tidak akan secepat sebagaimana ekonomi kapitalisme. Walaupun agak sedikit lambat, pertumbuhannya sehat dan kuat karena bertumpu pada ekonomi sektor riil.¹⁰¹

Indonesia yang besar adalah Indonesia di mana kelompok mayoritas menghargai dan negara melindungi hak-hak minoritas. Dalam kaitan ini Jamil berbicara tentang visi GP tentang pluralisme. Konsep GP tentang pluralisme tentu berbeda dengan kelompok moderat semacam Wahid Institute. Pluralisme dalam versi GP adalah politik mengelola sebuah masyarakat yang beragam, bukan bagaimana keragaman menjadi suatu prinsip hidup. Menurut GP, khilafah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, namun juga umat non-Muslim. Alasan klasiknya tentu saja karena Islam adalah ajaran yang memiliki dimensi universal. Namun, lebih teknisnya adalah alasan teologis bahwa sumber-sumber hukum Islam seperti Qur'an dan Sunnah telah memiliki konsep-konsep seperti *kafir dzimmi*. Juga apologi historis bahwa di berbagai tempat di mana umat Islam menjadi kelompok dominan, kelompok-kelompok minoritas selalu berkembang dengan baik tanpa diskriminasi.¹⁰²

Lantas bagaimana dengan KAMMI? Apakah KAMMI sebagai OKP berasaskan Islam juga berniat mewujudkan negara Islam di Indonesia? Dalam hal ini cara

¹⁰⁰ Jawa Pos, 19 Maret 2006

¹⁰¹ *Al-Wa'ie*, No. 99, 2008: 27

¹⁰² Wawancara dengan Muthohar Jamil

pandang KAMMI merupakan cara pandang moderat. Bagi KAMMI, konsep negara-bangsa yang ingin dibentuk adalah negara-bangsa yang rabhani, madani, adil, dan sejahtera.

”Yang pertama, bangsa yang rabhani yaitu bangsa yang religus, bangsa yang madhani yaitu yang beradaban, mentradisikan pengetahuan dan berkarya. Yang ketiga, bangsa yang berkeadilan, tidak mendeskriminasikan, tidak ada kemiskinan baik structural dan mental. Dan itu kita sama2 membangun bangsa ini menjadi lebih maju. 4 hal itulah yang kami citakan pada Indonesia.”

Selain itu, KAMMI juga memandang bahwa yang dibutuhkan bangsa ini adalah sosok kepemimpinan negara-bangsa, bukan struktur atau format negara. Indonesia akan menjadi negara-bangsa yang unggul dengan dipimpin oleh seorang muslim negarawan. Jika dilihat dari konteks UUD 1945, maka misi dan peran kenegarawanan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah, kenegarawanan versi KAMMI dijalankan. Muslim Negarawan adalah perpaduan kepemimpinan yang lima kompetensi. Lima kompetensi inilah yang menjadi landasan bagi KAMMI dalam membentuk kader-kadernya. Yaitu:

Namun kenegarawanan yang dimaknai KAMMI tidak dimaknai secara sekuler. Dengan istilah muslim, maka nilai-nilai keislaman mewarnai watak kewarganegaraan kader KAMMI.¹⁰³

Dalam konsep Muslim Negarawan, terdapat lima model ciri yang melekat di dalamnya. Yaitu, *pertama*, pemahaman agama yang mendalam. Pemimpin mewakili ideology mayoritas rakyatnya. Sehingga pengetahuan dan implementasi ajaran Islam dalam diri seorang pemimpin menjadi kekuatan yang dapat dijadikan teladan bagi rakyat. Tidak peduli bentuk Negara yang dijalankan, bahkan yang paling liberal sekalipun, agama tetap menjadi barometer moral untuk pemimpin. Umumnya Negara-negara Eropa dan Amerika masih menerapkan hal ini dalam memilih pemimpinnya. Republik Indonesia juga harus dipimpin oleh seorang

¹⁰³ Wawancara dengan Rijalul Imam

Muslim Negarawan yang inklusif dan berjanji akan membangun negeri bersama seluruh komponen bangsa. Agama tidak dijadikan sebagai pelengkap predikat untuk meraih kekuasaan. Tapi menjadi spirit perbaikan dan pembangunan masyarakat madani yang toleran dan demokratis.¹⁰⁴

Kedua, Idealis dan Konsisten. Syarat penting meraih kepemimpinan adalah konsistensi pada idealisme dan garis perjuangan yang senantiasa berpihak pada rakyat. Idealis dan konsisten tercermin sebagai kredibilitas moral seorang pemimpin yang terus diperhatikan publik. Inilah yang kemudian menjadi penilaian rakyat sebelum menjatuhkan pilihan pada calon pemimpinnya.¹⁰⁵

Ketiga, Ilmu yang luas dan pemikiran yang mapan. Pemimpin harus lebih dari rakyatnya pada sisi intelektualitas dan wawasan. Intelektualitas dapat dinilai dari kualifikasi akademis dan kepakarannya, serta perhatiannya terhadap satu masalah secara mendalam, misalnya ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan wawasan yang luas menuntut pemimpin harus generalis, memahami berbagai hal untuk mengambil keputusan dan tindakan.¹⁰⁶

Keempat, terlibat langsung dalam pemecahan masalah umat dan bangsa. Setiap pemimpin akan dinilai *track-record*-nya dalam pemecahan masalah di setiap level kepemimpinannya. Pemimpin puncak harus mengambil keputusan setiap saat dengan berbagai variasi masalah yang melatarinya, dan hampir semuanya pelik dan dilematis. Karena itu seorang pemimpin harus berpengalaman dalam banyak model pengambilan keputusan, percaya diri berkarakter dan berani.¹⁰⁷

Kelima, menjadi perekat berbagai komponen demi kemajuan bangsa. Kapasitas diplomasi dan jaringan harus teruji bagi setiap pemimpin dan calon pemimpin. Pemimpin adalah representasi satu atau beberapa kelompok yang sekaligus harus mengelola berbagai kelompok masyarakat dengan perspektif yang beragam. Dia harus menguasai nilai budaya lokal dan global, namun juga memiliki fleksibilitas dan kecerdasan dalam memimpin.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Amrullah, Taufik. *Muslim Negarawan, Spirit Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: KAMMI Pusat, 2008. Hal 119

¹⁰⁵ *Ibid.* Hal 119-120

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal 120

¹⁰⁷ *Ibid.* Hal 120

¹⁰⁸ *Ibid.* Hal 120

KAMMI tidak memiliki keinginan untuk membentuk negara Islam di Indonesia, karena yang diinginkan KAMMI bukan negaranya, melainkan masyarakatnya.

“Apapun bentuk negaranya, masalah yang substansial adalah Individunya yang seperti apa, jadi individu yang islami yaitu individu yang taat terhadap Islam, ada gairah religiusitas, dan juga kami menghormati agama2 lain sesuai dengan keyakinannya masing2, karena itu sudah hak yang dilindungi Negara.”¹⁰⁹

Sementara dalam mensikapi globalisasi, KAMMI menyatakan bahwa Globalisasi merupakan peluang, karena globalisasi merupakan ruang netral yang bagi siapapun dapat masuk dan memanfaatkannya.¹¹⁰ Karena sebenarnya, ada satu benang merah yang terbentang antara nasionalisme dengan Islam ketika berhadapan dengan globalisasi. Perlawanan terhadap globalisasi kini merupakan refleksi atau cerminan dari penentangan gerakan nasionalis dan gerakan Islam terhadap imperialisme-kolonialisme Barat pada masa lalu. Namun, di dalam menghadapi globalisasi, ketika Negara-bangsa sendiri menghadapi krisis identitas dan dipaksa untuk mengurangi peran-peran tradisionalnya, gerakan Islam muncul untuk melakukan berbagai bentuk perlawanan yang sifatnya lintas batas Negara dan bangsa. Apapun reaksi terhadap globalisasi, sebenarnya keduanya sedang menghadapi kolonialisme baru abad ini dengan sponsornya yang tetap sama: imperialisme.

Cara pandang ini sama dengan GMNI, bahwa negara-bangsa harus diperkuat untuk menekan efek negatif dari globalisasi. Karena bagi GMNI, globalisasi merupakan perwujudan dari neolib, neokapitalisme, dan neokolonialisme.

Bagi GMNI, negara berfungsi sebagai 'perumahan' bangsa yang memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan seluruh wilayah Republik Indonesia. Negara juga sebagai alat perjuangan untuk menuju terciptanya cita-cita nasional, yakni masyarakat adil makmur di tengah-tengah dunia tanpa penindasan.¹¹¹

Negara-bangsa juga dipandang oleh KMHDI sebagai negara yang mampu melindungi pluralitas dan kemanjemukan. Indonesia sebagai sebuah Negara yang plural dan menghargai kemajemukan adalah konsep Negara yang didamba oleh

¹⁰⁹ Wawancara dengan Rijalul Imam

¹¹⁰ Wawancara dengan Rijalul Imam

¹¹¹ Azas Perjuangan GMNI, Arsip organisasi GMNI

segenap anggota KMHDI. Untuk itu dalam pokok-pokok pikiran kenegaraan, KMHDI merumuskan dalam tiga hal, yaitu: Negara, Hukum dan Demokrasi.

Konsep Negara sebagai sebuah system pemerintahan terpusat dan dikendalikan hanya oleh lobi-lobi beberapa kelompok elit dalam suatu lingkaran para pengambil keputusan, bagi KMHDI harus dirubah dengan suatu konsep tentang Negara-bangsa yang mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Negara-bangsa ini juga harus mampu mengakomodasi pluralitas yang ada pada masyarakat dan bukan menggunakan pluralitas tersebut sebagai sebuah senjata potensial untuk memecah belah persatuan.¹¹²

Ada dua ekstrimitas dalam wacana dan strategi tentang pluralitas; di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang dengan mudah diikat dalam slogan Bhineka Tunggal Ika, di segi lain dipandang sebagai momok yang perlu diatasi dengan berbagai strategi politisasi. Keduanya meletakkan pluralitas sebagai stigma yang harus ditanggulangi. Kegagalan ekstrimitas pertama terjadi setelah agak lama bangsa dan Negara Indonesia hanya mengandalkan pada ideologi dan doktrin dalam mengikat persatuan dan kesatuan NKRI.

Kegagalan ekstrimitas kedua dalam mengatasi pluralitas berasal dari mereka yang berpikir secara strukturalis, bahwa dalam pluralitas yang ada hanyalah pertentangan, sehingga sukar sekali diupayakan integrasi. Pendekatan ini dipergunakan oleh Orde Baru secara efektif, sehingga meredam perbedaan dalam masyarakat plural tersebut tidak menjadi konflik manifes atau tidak meledak ke permukaan.

“Cakupan Indonesia apabila kita memandangnya adalah sebuah bangsa yang terdiri dari beberapa perbedaan yang bisa kita rangkai menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, kita berangkat dari sebuah perbedaan, pluralisme, dengan aneka budaya, suku, agama, dsb yang semua itu kita jadikan kekuatan sebagai dasar kekuatan pembangunan kita. Jadi, berangkat dari sebuah perbedaan.”¹¹³

Jika pluralitas telah menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (*pluralistic society*), maka kebutuhan yang segera muncul bukan meredam dan menyembunyikan pluralitas yang ada, atau memaksanya agar menyatu. Melainkan

¹¹² Lihat Penjelasan atas Purwaka AD/ART KMHDI

¹¹³ Wawancara dengan Wayan Sudane

memberikan ruang terbuka agar berbagai perbedaan tersebut muncul ke permukaan, berkelindan, dan berdialektika dengan wajar. Dalam ruang terbuka tersebut berbagai perbedaan dihubungkan oleh garis kolinier yang menurut KMHDI disebut demokrasi. Yang merupakan hal kedua dari pokok-pokok kenegaraan.

Bagi KMHDI, Tanpa demokrasi tidak akan mungkin ada keadilan, kekuasaan yang terbentuk dan dimiliki oleh suatu sistem, apabila berdasarkan hukum dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, yang walaupun ditujukan untuk menentang sistem yang tengah berkuasa, adalah hal-hal yang sangat esensial bagi suatu masyarakat yang ingin mewujudkan tempat hidup yang layak bagi umat manusia. Manakala demokrasi dihancurkan, maka kebebasan dan keadilan akan terbang ke awang-awang dan kepentingan rakyat tidak lagi dapat dilindungi dengan efektif.¹¹⁴

Demokrasi tidak dapat diwujudkan sebagai suatu realitas hanya dengan melalui pemilihan umum periodik. Demokrasi memerlukan peran serta aktif dan berkelanjutan dari warga negara di dalam proses politik. Dalam aplikasinya, negara harus dapat menjamin adanya kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat bagi setiap warga negara dengan fokus pertama adalah pemberian kebebasan yang sebesar-besarnya bagi pers. Dengan kebebasan pers, masyarakat secara perlahan-lahan akan mengalami proses pendewasaan diri dalam menganalisa pemberitaan oleh pers tersebut dan akan mampu memilah wacana-wacana yang sesuai bagi mereka dengan daya kritis yang dimilikinya. Pengawasan terhadap pers akan dilakukan oleh masyarakat sendiri, melalui lembaga yudikatif yang melaksanakan amanat rakyat dengan seadil-adilnya melalui hukum-hukum positif yang ada.¹¹⁵

Negara demokratis hanyalah berada dalam kedudukan memberi bentuk-bentuk yang diinginkan oleh masyarakat, bukan oleh kepentingan perhimpunan-perhimpunan yang berpengaruh atau oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Setiap kelompok memiliki hak untuk berperan serta dalam pembentukan kebijakan politik namun pada akhirnya, rakyat secara keseluruhan yang harus menegaskan sendiri keinginan mereka. Dengan nilai-nilai demokratis dalam

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

dirinya, negara akan mampu menjadi sebuah negara yang beradab dan memperoleh substansi kekuasaannya dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dan membantu mengembangkan semangat kreatif rakyat.¹¹⁶

Dan yang ketiga adalah konsep hukum sebagai salah satu pokok pikiran kenegaraan KMHDI. KMHDI memandang, Penguatan daya dan kepastian hukum sangat diperlukan dalam sebuah proses menuju sebuah bangsa yang beradab dan memiliki norma-norma dalam kehidupan sosial. Hukum harus menjadi panglima dalam pencarian keadilan bagi setiap warga negara. Proses dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum positif, harus selalu memihak pada keadilan. Proses ini harus dapat dikontrol oleh rakyat secara aktif dalam bentuk partisipasi politik mereka.¹¹⁷

Berkaitan dengan konteks globalisasi, KMHDI memandang bahwa globalisasi dapat menyerang eksistensi negara-bangsa. Bagi KMHDI, globalisasi adalah realitas kontemporer yang memiliki wajah ganda; peluang dan ancaman. Peluangnya adalah berbagai fasilitas teknologi dan nilai-nilai universal yang tersebar melaluinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Sedangkan ancamannya adalah sistem kapitalisme global yang membuka persaingan berdasarkan nilai dan kualitas. Persaingan itu bukan hanya pada level negara, namun juga individu. Menurut KMHDI, negara-negara yang tidak siap bersaing akan mengalami intervensi oleh negara-negara kuat. Bagaimana dengan individu? Menurut KMHDI, kapitalisme mengusung semangat individualisme dan pragmatisme. Dalam kaitan ini maka di samping negara-bangsa mengalami krisis kewibawaan, seorang warganegara juga berpotensi mengalami krisis loyalitas karena naluri pragmatismenya. Terlebih jika pragmatisme itu ditunjang oleh alasan-alasan primordial lainnya.

Dalam konteks ini, peran negara-bangsa sangat penting. Formasi diskursif dari nasionalisme KMHDI dicirikan oleh upaya dekonstruksi terhadap peran negara secara historis, namun rekonstruksi terhadapnya sebagai sebuah ide. Negara lama yang otoritarian dan diskriminatif harus digantikan oleh negara baru yang lebih mampu melindungi dan menyejahterakan seluruh warganya tanpa kecuali. Oleh karenanya, bagi KMHDI, demokrasi dan hukum harus dijunjung

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

tinggi dalam sebuah Negara. Karena demokrasi dan hukum adalah manifestasi kebangsaan.

F. ANALISA KONTESTASI DISKURSUS

Seperti diisyaratkan Calhoun (2007), terdapat kontestasi wacana nasionalisme di antara keempat organisasi kemasyarakatan pemuda tersebut. Kontestasi tersebut berlangsung dalam kerangka bagaimana Indonesia didefinisikan, gagasan tentang nasionalisme, dan acuan ideologis masing-masing (lihat tabel 9.1).

Tabel 9.1
Kontestasi Wacana Nasionalisme Di Antara Empat OKP

Daftar OKP	Ide Ttg Indonesia	Ide Ttg Nasionalisme	Ide Ttg Indentitas Nasional	Ide Ttg Negara-bangsa
KAMMI	Indonesia yang berawal dari sejarah keragaman menuju satu kesatuan. Indonesia tidak harus berupa negara Islam, yang terpenting adalah masyarakat menerapkan nilai-nilai Islam sebagai nilai-nilai universal	Nasionalisme adalah bagian dari ajaran Islam. Nasionalisme diterapkan dalam diklat kaderisasi. Sebagai perpaduan antara nasionalisme dengan agama (nasionalisme religius	Indentitas nasional berasal dari identitas-identitas lokal termasuk didalamnya muatan-muatan agama	Negara-bangsa yang rabhani, madani, adil, dan sejahtera. Negara-bangsa membutuhkan sosok pemimpin muslim negarawan.
Gema Pembebasan	Indonesia adalah warisan Islam. Indonesia merupakan negara yang	Nasionalisme merupakan strategi / taktik, bukan bersifat filosofis ataupun	Indentitas nasional harus berlandaskan agama. Untuk itu, Islam adalah identitas nasional	Negara-bangsa akan sirna digantikan oleh kekuatan unipolar bernama

	terdiri dari keragaman budaya / plural	ideologis. Nasionalisme harus berlandaskan agama dan merupakan kesadaran transisional	sekaligus karakter bangsa. Karena agama tidak mengenal sekat wilayah. Dan Islam sebagai agama mayoritas sekaligus sisi historikal Indonesia melawan penjajahan	khilafah. Dan globalisasi merupakan peluang untuk mewujudkan itu.
GMNI	Indonesia berdasar Pancasila sebagaimana ajaran Bung Karno	Nasionalisme adalah pembelaan terhadap rakyat kecil dan kaum proletar dari segala bentuk kapitalisme dan imperialisme. Nasionalisme juga bersifat humanistik dengan mengedepankan kemanusiaan.	Identitas nasional dibentuk oleh Negara (nilai-nilai Pancasila) dan diturunkan ke masyarakat. Identitas nasional dibentuk dari budaya-budaya lokal.	Negara-bangsa yang kuat untuk melawan imperialisme dan kapitalisme global dan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Globalisasi merupakan peluang sekaligus ancaman.
KMHDI	Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan dan pluralitas	Nasionalisme Adalah bentuk penerjemahan dari dharma Negara, yang tumbuh dari perasaan senasib dengan saudara sebangsa. Ikut memiliki	Identitas nasional dapat dibentuk dari identitas-identitas lokal tanpa harus saling mengalahkan dengan dibingkai oleh Bhineka Tunggal Ika	Negara-bangsa yang bernilai Pancasila dan Kebhinekaan. Negara-bangsa yang mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan

		bangsa dan ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa		keputusan. Negara-bangsa juga harus akomodasi dan melindungi pluralitas
--	--	--	--	---

Transformasi dari nasionalisme negara kepada nasionalisme pasca reformasi menghadirkan implikasi teoritik penting terkait dengan pembacaan terhadap nasionalisme. Penelitian ini pada dasarnya telah menguatkan catatan kritis terhadap teori-teori tua tentang nasionalisme seperti dikemukakan oleh Ernest Gellner (1983). Catatan-catatan kritis tersebut sebelumnya telah dikemukakan oleh sejumlah teori yang lebih baru seperti Castells (1997) dan Calhoun (2007) dalam pembahasan yang dilakukan pada bab kedua. Namun demikian, bukan berarti catatan-catatan kritis mereka sepenuhnya menemukan konteksnya dalam penelitian ini. Pandangan Castells bahwa gagasan tentang negara-bangsa segera luruh karena tantangan globalisasi tidak dapat diterima sepenuhnya oleh temuan penelitian ini. Castells sebenarnya telah memberi harapan bagi munculnya nasionalisme sebagai suatu identitas perlawanan. Namun, dalam penelitian ini mengemuka bahwa perlawanan para nasionalis terhadap elite-elite global senantiasa diiringi harapan akan tumbuhnya negara-bangsa yang kuat.

Meski sangat kritis terhadap negara, pada dasarnya memori kolektif tentang nasionalisme integratif masih melingkupi kesadaran masyarakat sipil. Bagi para nasionalis, Indonesia masihlah seperti gagasan Soekarno, yaitu kesatuan antara orang dan tempat, dalam hal ini gugusan kepulauan Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Perwujudan dari gagasan itu akan tetap bertahan sepanjang negara yang kuat masih lestari. Oleh karena itu, sebagian besar perlawanan masyarakat sipil terhadap negara tidak dapat disejajarkan dengan proses balkanisasi di Eropa Timur. Perlawanan mereka terhadap negara-bangsa muncul karena trauma terhadap sejarah otoritarianisme rezim-rezim di masa lalu. Namun, meski penting, negara-bangsa tidak lagi ditempatkan sebagai sentral. Negara-bangsa hanya penting sebagai penjaga teritori, bukan pengendali manusianya. Memang terdapat pula perlawanan terhadap gagasan negara-bangsa yang bertendensi ideologis.

Castells benar bahwa nasionalisme kontemporer lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Namun pernyataannya bahwa nasionalisme “lebih bersifat cultural daripada politis dan lebih berorientasi kepada pembelaan terhadap suatu budaya yang terlembagakan daripada kepada pembentukan atau pembelaan terhadap sebuah negara” nampaknya perlu diperbincangkan lebih dalam. Studi ini memang mendapati bahwa pernyataan-pernyataan yang nasionalistik muncul sebagai reaksi terhadap berbagai ragam soal. Namun, soal-soal itu tidak selalu lebih bersifat kebudayaan daripada politik. Seringkali justru sebaliknya. Sebagian besar persoalan itu seringkali dilihat dalam perspektif politik sebagai entitas-entitas yang melakukan represi atau dukungan terhadap kepentingan komunitas-komunitas politik dan kebudayaan tertentu.

G. PENUTUP

Dari analisa yang terdapat di bab ini dapat ditarik benang merah dan kesamaan wacana (*common denominator*) dari gagasan-gagasan tentang Nasionalisme Indonesia yang dikeluarkan oleh OKP yaitu:

1. Seluruh OKP sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang plural, dan dibentuk dari ragam budaya, bahasa, dan agama. Ragam budaya yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilestarikan. Dan menjadi tanggung jawab negara untuk mengatur dan menjaga kelestariannya.
2. Reaksi terhadap nasionalisme negara di mana representasi utamanya adalah orde baru. Diskursus yang monolitik dari nasionalisme Negara orde baru dianggap sebagai alat diskriminasi, dan instrumen penjajahan internal.
3. Seluruh OKP sepakat bahwa nasionalisme adalah alat atau strategi untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan bagi masing-masing OKP berbeda-beda. Bagi KMHDI, tujuannya adalah untuk membentuk negara bangsa yang menghargai perbedaan dan melindungi hak-hak minoritas. Bagi GMNI tujuannya adalah terbentuknya negara bangsa yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan yang diwariskan oleh *founding fathers*. Bagi KAMMI tujuannya adalah terbentuknya negara Indonesia yang rabhani,

madani, adil, dan sejahtera. Sedangkan bagi Gema Pembebasan, tujuannya adalah terbentuknya negara Islam berbasis khilafah.

4. Seluruh OKP sepakat bahwa diskursus tentang globalisasi merupakan tantangan bagi nasionalisme. Sebagian menanggapinya secara optimis, sementara sebagian yang lain melihatnya sebagai model penjajahan baru.
5. Adapun bagi pemerintah, Indonesia harus mempertahankan empat konsensus dasar pembentukan negara-bangsa Indonesia, yaitu: UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Dan Nasionalisme harus diwujudkan sebagai *civic nationalism*, bukannya *romantic nationalism*. *Civic nationalism* adalah paham dan semangat kebangsaan dan bernegara yang lahir dari kesadaran dan pemahaman akan tujuan dan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Bukan nasionalisme yang dibangun dari nilai-nilai romantisme, yaitu nasionalisme yang bersifat emosional, primordial, dan simbolik.

